

PARTICIPATORY ACTION RESEARCH

**KONSTRUKSI SOSIAL GENDER
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
DI 5 DESA KAWASAN
SUB DAS POHGADING SUNGGEN DAN PANCOR BARONG
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



**GEMA ALAM
NUSA TENGGARA BARAT
JUNI 2013**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga laporan akhir tentang Peningkatan Kapasitas Staff Gema Alam Untuk Memajukan Keadilan Gender Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di 5 Desa kawasan Sub DAS Pohgading Sunggen dan Pancor Barong ini dapat terselesaikan. Program ini bertujuan untuk pemeratakan kapasitas di internal lembaga terkait konsep gender yang akan diintegrasikan dalam setiap program organisasi.

Program ini dilaksanakan oleh GEMA ALAM NTB dengan melibatkan 5 (lima) *Community Organizer (CO)* perempuan dari Desa Beriri Jarak, Bebidas, Suela, Sapit dan Desa Jurit Baru beserta 3 (tiga) Fasilitator Komunitas Laki-laki Baru (LLB). Oleh karena itu, kepada Kepala Desa di lima desa dan jajarannya, 5 (lima) CO perempuan, 3 (tiga) Fasilitator LLB dan masyarakat desa setempat disampaikan terima kasih tak terhingga. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Fauzan, M. Pd., Bapak Habibuddin, M. Pd. Beserta semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendedikasikan kemampuannya dalam program ini.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam program ini. Untuk itu, kami sangat mengharapkan masukan, saran dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan, sehingga dalam perjalanan waktu demi waktu laporan ini mencapai arah yang makin dekat dengan kesempurnaan. Akhirnya, semoga hasil dari program ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung.

Lombok Timur, 5 juni 2013

GEMA ALAM NTB

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Batasan dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Konsep Sumber Daya Alam (SDA)
- B. Sosial Gender Masyarakat dan Perubahan
 - 1. Perubahan Sosial dan Kebudayaan
 - 2. Gender dan SDA
 - 3. Gender dan Perubahan SDA
- C. Strategi Pengelolaan
 - 1. Penggalian SDA Pada Masyarakat
 - 2. Pemberdayaan Potensi Lokal Masyarakat
 - 3. Kerjasama Pengelolaan SDA
 - 4. Partisipasi Gender dalam Pengelolaan SDA

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan
- B. Tahapan
- C. Lokasi
- D. Waktu
- E. Partisipan
- F. Pengumpulan Data

BAB IV KARAKTERISTIK WILAYAH PENELITIAN

- A. Keadaan Umum
- B. Penduduk dan Mata Pencaharian
- C. Kondisi Sarana Prasaran
- D. Kelembagaan
- E. Karakteristik Sosial-Budaya
 - 1. Sistem Pengetahuan
 - 2. Religi dan Adat Istiadat
 - 3. Pranata Sosial dan Pengelolaan SDA
 - 4. Persepsi Gender tentang SDA

BAB V KONSTRUKSI GENDER DALAM PENGELOLAAN SDA

- A. Identifikasi Pengelolaan SDA
 - 1. Hasil Kajian Partisipatif Tahap I
 - 2. Hasil Kajian Partisipatif Tahap II
- B. Model Pengelolaan Sumber Daya Alam di Desa Kawasan Hutan
 - 1. Desa Sapit
 - Gambaran umum desa
 - Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan
 - 2. Desa Suela
 - Gambaran Umum Desa
 - Pengelolaan Ekowisata
 - 3. Beririjarak, Bebidas dan Jurit Baru
 - Gambaran Umum Desa
 - Pengelolaan Air Minum

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Sub DAS Pohgading Sunggen berada di lingkaran kawasan Rinjani, meliputi Kecamatan Suela dan Wanasaba. Lokasi ini berjarak terpanjang 25 km dari ibu kota kabupaten dan 73 km dari ibu kota provinsi, pada ketinggian antara 320-700 mdpl. Di Kawasan seluas 8.085,15 hektar ini terdapat 14 desa, dihuni oleh 20.099 KK/61.738 Jiwa. Desa Suela, Sapit, Beriri Jarak dan Bebidas merupakan empat diantara desa-desa yang ada, *plus* desa Jurit Baru Kecamatan Pringgasela di kawasan Sub DAS Menanga. Desa-desa ini memiliki sumber daya alam; potensi ekowisata, hutan, air, lahan pertanian dan perkebunan dengan hasil cukup melimpah.

Pada sejarahnya, potensi tersebut merupakan sumber-sumber kehidupan (SSK) masyarakat, berpegang pada *awig-awig* (peraturan local) yang menjadi norma dalam memperlakukan sumber daya hutan, air, beserta SSK lainnya. Namun, saat ini akses dan control tersebut didominasi oleh kaum elit; pengusaha local dan tokoh masyarakat, terdiri dari laki-laki yang menguasai aset produksi berupa tanah, termasuk akses pengelolaan lahan hutan serta dominasi politik pengambilan keputusan dalam proses pembangunan. Jikapun terdapat perempuan, peran dan posisinya masih sebatas ranah domestic, dan sebagai “alat legitimasi,” tanpa dibarengi dengan kapasitas memadai (partisipasi semu). Begitu pula dalam kegiatan berkumpul, perempuan jarang terlibat. Ini disebabkan karena terjadi juga *stereotype* terhadap yang aktif dalam perkumpulan, dicap sebagai perempuan suka selingkuh. Kondisi ini “memaksa” pilihan untuk membantu orang tua dan suami, bekerja sebagai buruh tani dan usaha rumahan. Hal lain, suami yang melakukan pekerjaan domestic, digunjing bahwa istrinya pemalas, mengalahkan suami, dan stigma negative lainnya, bahkan dianggap tidak cocok menjadi “bibit”. Lainnya lagi, perempuan lajang yang berusia di atas usia 15-17 tahun dianggap

perawan tua, tidak laku. Ini menyumbang tingginya angka pernikahan dini sekaligus janda usia dini. Lalu, menjadi jandapun mengundang *stereotype* baru, yaitu adanya anggapan masyarakat sebagai perempuan genit, suka menggoda suami orang, bahkan perempuan murahan. Kondisi ini kemudian menyebabkan mereka memilih untuk dapat keluar dari desanya, dan menjadi TKW merupakan pilihan “primadona” karena bayangan penghasilan/pendapatan yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan pencaharian lainnya. Ironi ini terjadi di tengah tidak adanya keahlian yang mereka miliki sehingga akhirnya menyumbang maraknya TKW tak berkeahlian. Di desa kawasan ini, perempuan juga mengalami *double burden*. Selain harus melakukan kegiatan reproduktif, banyak juga yang mesti menanggung beban produktif. Ini kerap disebabkan oleh rendahnya taraf ekonomi keluarga karena tidak memiliki akses terhadap aset produksi sehingga harus *survive* dengan berburuh-tani. Namun, terjadi pembedaan upah buruh tani perempuan dan laki-laki dengan alasan pekerjaan laki-laki lebih berat daripada perempuan. Tapi juga, perempuan tidak mendapat kesempatan untuk melakukan pekerjaan seperti laki-laki, jika ingin memperoleh upah yang lebih tinggi. Perempuan tidak dipercaya melakukan pekerjaan seperti halnya laki-laki, seperti membajak, mencangkul, membuat bedengan, memupuk tanaman dengan pupuk cair. Ironisnya, perempuan sendiri cenderung pasrah bahkan turut memandangnya sebagai takdir. Hal ini karena rendahnya pemahaman tentang hak-haknya dan masih kuatnya anggapan dari kaum laki-laki sendiri bahwa mereka sebagai jenis kelamin pertama/ superior yang harus di layani dan didahulukan oleh perempuan.

Dari kondisi tersebut, Gema Alam yang *concern* sejak 2007 di kawasan memandang urgensi pengelolaan sumber daya alam; hutan, air, potensi ekowisata, pertanian dan perkebunan, secara baik, adil dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, social dan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan kajian dengan metode *Participatory Action Research* (PAR), ke depan diharapkan menjadi acuan untuk menyusun perencanaan yang memadai guna mewujudkan Kampung Adil gender dalam PSDA di 5 desa kawasan SUB Das Pohgading Sunggen dan Pancor Barong.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi pada pengungkapan peran atau andil perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa Sapit, Suela, Bebidas, Beririjarak dan Jurit Baru Kabupaten Lombok Timur.

Adapun pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kapasitas perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam ?
2. Bagaimana alokasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam ?
3. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pembedaan jenis pekerjaan buruh tani laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan SDA ?
4. Bagaimana pandangan masyarakat tentang beban ganda yang dijalankan oleh perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan cakupan pada masalah yang dikaji, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kapasitas perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam.
2. Untuk mengetahui alokasi kekuasaan antar laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam.
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang pembedaan jenis pekerjaan buruh tani laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan SDA.
4. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang beban ganda yang dijalankan oleh perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya serta memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan alternatif (*alternative education*) bagi masyarakat (perempuan) desa, khususnya di Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan kualitas SDM.

2. Manfaat praktis

Penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah diskusi ilmiah tentang kekuasaan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berandil positif dan representatif-objektif bagi upaya perbaikan sistem dan relasi sosial khususnya relasi suami-istri dalam kaitannya dengan hak pengambilan keputusan bagi kehidupan rumah tangganya dalam pengelolaan sumber daya manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Sumber Daya Alam (SDA)

Lingkungan hidup memiliki peranan strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Baik buruknya kondisi kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungannya hidup yang ada di sekitarnya. Para pakar lingkungan banyak memberikan rumusan pengertian tentang lingkungan hidup. Diantaranya adalah menurut Anonymous, 1977 bahwa lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang ADA DALAM RUANG yang kita tempati yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yg mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian yang hampir sama juga disampaikan oleh *Darsono*, 1995 yang menyatakan bahwa Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Dari pengertian lingkungan hidup yang sudah dijelaskan oleh para ahli di atas pada intinya adalah bahwa lingkungan hidup merupakan segala hal yang dapat mempengaruhi kehidupan segala makhluk yang hidup di dunia ini.

Selanjutnya, Soemarwoto (1997) menjelaskan faktor-faktor yang dapat menentukan sifat lingkungan hidup, dia menyebutkan bahwa terdapat 4 (Empat) faktor yang dapat menentukan sifat lingkungan hidup, diantaranya :

1. Jenis dan jumlah masing2 jenis unsur lingkungan hidup tersebut.

2. Hubungan atau interaksi antara unsur dlm lingk. hidup, dan hubungan sosial-budaya manusia.
3. Kelakukan atau kondisi unsur lingkungan hidup.
4. Faktor non-materiil suhu, cahaya, dan kebisingan.

Keberadaan lingkungan hidup menjadi penentu bagi keberlangsungan hidup manusia, ia bisa saja menjadi bencana atau bahkan sebaliknya menjadi keberkahan bagi umat manusia, tergantung bagaimana manusia membangun instraksi dengannya. Oleh karenanya, agar lingkungan hidup dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi umat manusia, maka manusia mesti melakukan pengelolaan dengan baik.

Pengelolaan lingkungan hidup sudah banyak dirumuskan oleh para pakar lingkungan hidup. Di negara indonesia, pengertian pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan dalam UU No. 32 Tahun 2009 pasal 1, yang berbunyi Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Soemarwoto (1997), secara lebih rinci memberikan pengertian tentang pengelolaan lingkungan hidup. Menurutnya pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka ragam yang diantaranya adalah:

1. Pengelolaan lingkungan secara rutin.
2. Perencanaan dini pengelolaan lingkungan suatu dasar dan tuntunan bagi perencanaan pembangunan.
3. Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang sedang direncanakan.

4. Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun karena tindakan manusia.

Manusia sejak keberadaannya di dunia ini sudah melakukan pengelolaan lingkungan, segala potensi yang terdapat di dalamnya diolah sedemikian rupa menjadi beragam bentuk dan manfaat. Hal itu semua dilakukan hanya semata-mata untuk keberlangsungan hidup manusia. Akan tetapi, fakta yang ada sekarang ini manusia sudah menyimpang dari garis-garis pengelolaan yang sudah ditetapkan, telah terjadi eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali di mana-mana. Manusia terus menuruti hawa nafsunya untuk memenuhi kepentingan hidupnya dengan mengeksploitasi potensi sumber daya alam dengan cara-cara yang berlebihan. Akibatnya, bukannya keberlangsungan hidup yang diperoleh, sebaliknya yang terjadi justru keberadaan lingkungan hidup semakin mengancam eksistensi manusia di muka bumi ini atas ulahnya sendiri.

B. Sosial Gender Masyarakat dan Perubahan

1. Konsep Gender

Gender pada hakekatnya adalah sebuah tema yang digunakan untuk membedakan peran antara laki-laki dan perempuan, hasil rekayasa manusia sebagai akibat pengaruh sosial budaya masyarakat yang tidak bermakna kodrati. Di dalam *Women's studies Encyklopedia* disebutkan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat. Tidak dipungkiri, bahwa seringkali muncul relasi problematik antara laki-laki dan perempuan. Bukan perbedaan alamiah keduanya, tetapi implikasi yang tercipta dari perbedaan tersebut. Hampir tidak ada isu psikologis apapun yang begitu kontroversial dan kompleks dibandingkan dengan isu ini.

Menurut Vitayala (2010), gender adalah suatu konsep yang menunjuk pada suatu sistem peranan dan hubungannya antara perempuan dan lelaki yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologi, akan tetapi ditentukan oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi.

Sementara itu, WHO (2012) mendefinisikan gender adalah seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan, yang dikonstruksikan secara sosial dalam suatu masyarakat.

Pranata sosial yang kita masuki sebagai individu, sejak menjadi bagian keluarga saat lahir, melalui pendidikan, kultur pemuda, dan ke dalam dunia kerja dan kesenangan, perkawinan dan membentuk keluarga sendiri, memberi pesan yang jelas kepada kita bagaimana orang “normal” berperilaku sesuai dengan gendernya (*Mosse, 1996: 63*).

Konstruksi sosial budaya *gender*, seorang laki-laki misalnya haruslah bersifat kuat, agresif, rasional, pintar, berani dan segala macam atribut kekelakian lain yang ditentukan oleh masyarakat tersebut, maka sejak seorang bayi laki-laki lahir, dia sudah langsung dibentuk untuk “menjadi” seorang laki-laki, dan disesuaikan dengan atribut-atribut yang melekat pada dirinya itu.

2. Perubahan Sosial dan Kebudayaan

Menurut William F. Ogburn dan Mayer F. Nimkoff (1964), bahwa ruang lingkup perubahan sosial akan meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial;

Launer (1993: 73), bahwa tingkat analisis perubahan sosial yang terkecil adalah individu, kemudian ditambah dengan tingkat interaksi, organisasi, institusi, komunitas, masyarakat, kebudayaan, peradaban dan pada tingkat dunia (global).

Perubahan budaya :

Perubahan memiliki suatu ciri dalam ekologi budaya adalah perhatian mengenai adaptasi pada dua tataran, yaitu :

- (1) berhubungan dengan cara sistem budaya beradaptasi terhadap lingkungannya, dan
- (2) Konsekuensi adaptasi sistemik itu-perhatian terhadap cara institusi-institusi dalam sesuatu budaya beradaptasi atau saling menyesuaikan diri.

Gender dan SDA

- 1) Banyak isu lingkungan yang tadinya berdiri sendiri sebagai isu lingkungan seperti perubahan iklim dan bencana, sekarang bergeser menjadi isu pembangunan
- 2) Salah satu kelompok penerima dampak terbesar, jika kita bicara tentang lingkungan dan menurunnya fungsi layanan aset alam adalah perempuan.
- 3) Perempuan dan perbedaan peran perempuan dalam masyarakat di Indonesia membuat beban yang lebih bagi perempuan.
- 4) Perempuan sering mengalami ketidakadilan akibat perbedaan gender tersebut.

Gender dan Perubahan SDA

Partisipasi Gender

Mubyarto (dalam Ndraha, 1987), mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Nelson (dalam Ndraha, 1987), menyebutkan ada dua macam partisipasi, yaitu;

- Partisipasi antar sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal, dan

- Partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antara *client* dengan *patron*, atau antara masyarakat dengan pemerintah yang diberi nama partisipasi vertikal, sehingga keterlibatan dalam kegiatan, seperti perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- Partisipasi dlm perencanaan pembangunan lingkungan, termasuk pengambilan keputusan. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat.
- Partisipasi dalam menilai pembangunan lingkungan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana dan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tahap-Tahap Partisipasi

Ndraha (1987), bentuk/tahap partisipasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam atau melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
- b. partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.

Cara menggerakkan Partisipasi :

- a. Menurut Ndraha (1987), partisipasi masyarakat dapat digerakkan melalui:
- b. Program pembangunan desa dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat.
- c. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- d. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan lingkungan.

Tujuan dasar partisipasi masyarakat, yaitu :

1. Mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2. Mengeikutsertakan masyarakat dalam pembangunan negara.
3. Membantu pemerintah untuk dapat mengambil kebijaksanaan dan keputusan yang lebih baik dan tepat.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. PENDEKATAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*. Menurut Kurt Lewin, 1947 *Action Research (AR)* adalah proses spiral yang meliputi: (1) perencanaan tindakan yang melibatkan investigasi yg cermat; (2) pelaksanaan tindakan; dan (3) penemuan fakta-fakta tentang hasil dari tindakan, dan (3) penemuan makna baru dari pengalaman sosial.

2. TAHAPAN

Tahap I : Desember 2012 – Maret 2013

a) Team building

Desa-desa yang menjadi lokasi penelitian merupakan desa yang sebelum adanya proyek ini Gema Alam sudah melakukan pendampingan, sehingga kondisi secara umum desa tim sudah mengenalnya. Sehingga, tim peneliti tidak perlu melakukan penjajagan dan pengenalan lingkungan. Hanya saja, yang perlu dilakukan adalah pemetaan bakal calon tim pengkaji dari unsur komunitas, hal ini dilakukan karena proyek ini dihayatkan untuk meningkatkan kapasitas staff Gema Alam dan komunitas. Pelibatan komunitas sebagai tim pengkaji juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas komunitas guna memperluas mitra Gema Alam dalam upaya mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang adil gender. Mengingat setelah kajian ini dilakukan, akan ada upaya-upaya berkelanjutan yang akan dikembangkan di desa, sehingga membutuhkan peran aktif dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlunya dilakukan pemetaan calon tim pengkaji dari desa agar

mereka yang dibekali merupakan orang yang tepat dan siap menjadi mitra Gema Alam dalam upaya-upaya memajukan keadilan gender di desa.

Setelah mendapatkan orang yang tepat dari desa yang dilibatkan sebagai tim pengkaji, selanjutnya bersama dengan staff Gema Alam dilakukan pembekalan terkait dengan konsep gender dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, tim juga dibekali teknik fasilitasi menggunakan alat-alat kajian yang sudah ditentukan. Hal ini dilakukan agar tim dapat memfasilitasi masyarakat dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan lingkungannya.

Selanjutnya, setelah tim dibekali pengetahuan dan teknik fasilitasi, sebelum turun melakukan kajian ke desa, terlebih dahulu dilakukan persiapan masyarakat dengan melakukan koordinasi kepada Pemerintah desa, tokoh-tokoh desa setempat dan komunitas. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dengan pemerintah desa dan masyarakat, dan juga untuk memastikan kesiapan masyarakat untuk menghadiri diskusi. Karena metode yang digunakan dalam PAR ini adalah *Focuse Group Discussin* (FGD) dengan mengumpulkan masyarakat dari beragam klas sosial dan profesi.

b) Rencana Aksi Strategis/Study and Planning I

Pada tahap ini, bersama masyarakat dengan beragam klas sosial dan profesi yang difasilitasi oleh tim melakukan analisis terkait masalah sosial gender dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan keterampilan fasilitasi yang dimiliki oleh tim menggunakan alat kajian yang sudah ditentukan menggiring masyarakat untuk mengungkap permasalahannya secara kritis dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Masyarakat diajak untuk menggali potensi dan masalahnya, kemudian berdasarkan hal tersebut disusun perencanaan sebagai tindaklanjut dari hasil kajian.

c) Tindakan/Actualisasi I

Diskusi menghasil beberapa masalah yang teridentifikasi, namun masalah yang paling umum terjadi adalah soal pemahaman masyarakat terkait konsep gender, sebagian dari mereka yang pernah mengikuti diskusi-diskusi ternyata mendapatkan pengetahuan yang keliru terkait gender, sedangkan mereka yang tidak pernah mengikuti pertemuan-pertemuan atau diskusi tidak mengetahui samasekali tentang gender. Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, masyarakat meminta untuk difasilitasi diskusi tentang gender. Maka secara berkeliling di 5 desa kawasan dilakukan diskusi bertempat di rumah warga dan musalla, waktunya masyarakat yang menentukan, tergantung kesempatan mereka, ada yang meminta waktu malam hari dan siang hari.

Menyadari potensi sumber daya alam melimpah yang dimiliki, namun tidak ada upaya untuk mengelolanya, misalnya saja mengolah hasil pertanian dan perkebunan menjadi produk olahan, padahal sumber daya manusia mereka sudah miliki, begitu juga dengan peluang yang tersedia cukup besar, menggugah hati mereka untuk melakukan pengolahan terhadap hasil pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu kemudian masyarakat di Desa Bebidas dan Beririjarak meminta untuk difasilitasi membentuk kelompok usaha. Sebagai tindaklanjutnya, di Desa Beririjarak terbentuk 3 kelompok perempuan dan 1 kelompok perempuan di Desa Bebidas. Sedangkan di Desa Sapt, Suela dan Jurit Baru sebelumnya sudah terbentuk kelompok, sehingga mereka hanya minta pengembangan keterampilan dalam mengolah hasil pertanian dan perkebunan serta hutan.

Selain itu, di Desa Bebidas masyarakatnya meminta untuk difasilitasi membentuk *Himpunan Pengguna Air Minum (HIPAM)*. Hal ini didorong oleh karena munculnya kesadaran mereka bahwa model pengelolaan air yang selama ini diterapkan tidak akan bisa menjawab persoalan air yang dihadapi. Sehingga menurut mereka model pengelolaan HIPAM ini lebih ideal dan diyakini akan mampu menyelesaikan persoalan air minum yang dihadapi.

Dari kalangan pemuda juga menyadari potensi yang mereka miliki, namun karena tidak terorganisir, maka belum pernah terfikir untuk mendayagunakan potensi yang mereka miliki. Untuk menjawab hal tersebut, maka telah terbentuk 3 organisasi pemuda, yaitu di Beririjarak, Bebidas dan Sapit, sedangkan di Desa Suela sebelumnya sudah dibentuk organisasi pemudanya.

d) Koleksi dan Analisis Data

Oleh karena seluruh kegiatan penelitian ini merupakan suatu proses dan berjalan secara serempak, maka secara teoritis analisis dan pengumpulan data dilakukan secara berulang-ulang (*cyclical*). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan perangkat pemikiran logis yang bersifat induktif. Maksudnya adalah melakukan generalisasi terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus dan juga digunakan cara analisis deduktif, yaitu memaparkan kenyataan yang ada dengan bertolak belakang kepada kerangka-kerangka teori.

e) Refleksi I

Refleksi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian dari hasil kajian, menganalisis kendala atau tantangan internal dari tim sendiri dan lapangan yang muncul selama proses berjalan, sembari juga melakukan telaah kritis metodologis dan hasil kajian. Kegiatan refleksi hasil kajian dikemas dalam bentuk kegiatan Lokakarya yang melibatkan instansi pemerintah terkait, LSM, Pemerintah desa, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, petani dan buruh tani. Selain itu juga dihadirkan seorang akademisi yang memiliki keahlian terkait metodologi. Kegiatan lokakarya difasilitasi oleh seorang fasilitator berpengalaman yang memang sengaja disiapkan oleh tim.

Beberapa masukan terhadap hasil kajian yang mesti harus dilengkapi kembali oleh tim, diantaranya adalah:

1. Perlunya kajian ini dilengkapi dengan data jumlah kebutuhan air untuk lahan pertanian dalam 1 ha dan jumlah kebutuhan air dalam 1 KK/hari.

2. Kawasan pertanian yang tidak bisa terjangkau air pada musim panas & lokasi warga yang belum terjangkau air bersih.
3. Kalender kerja harian masyarakat berdasarkan mata pencaharian harus dipilah. Sebelumnya tim tidak melakukan pemilahan kalender kerja harian masyarakat, sehingga tidak menggambarkan bagaimana aktifitas warga berdasarkan mata pencaharianya.
4. Informasi terkait aturan2 pengelolaan air irigasi & bersih kurang tajam.

Dari segi metodologis, beberapa masukan juga disampaikan oleh peserta, antara lain:

1. Hasil kajian belum menemukan jalan penyelesaian.
2. Hasil kajian masih pada tahapan investigasi masalah, belum muncul bagaimana hubungan konstelasi di masyarakat.

Dari internal tim juga ditemukan beberapa kendala, diantaranya tim masih belum memahami secara utuh alat kajian, sehingga hasil kajiannya tidak begitu mendalam. Selain itu, sebagian tim masih kurang percaya diri dalam melakukan fasilitasi, hal ini terjadi karena sebagian dari fasilitator berasal dari komunitas yang noabenenya adalah baru pertamakalnya melakukan fasilitasi.

Tahap II : April – Mei 2013

a) Evaluasi

Pada tahap II ini, untuk menambah informasi yang diperlukan, dilakukan penambahan alat, yaitu “Diagram Venn.” Bersama itu pula, dilakukan pemantapan pemahaman tim terkait konsep gender dan teknik fasilitasi penggunaan alat.

Untuk mempertajam hasil kajian, selain menggunakan beberapa tambahan alat, juga dilakukan wawancara semi terstruktur. Alat kajian seperti Diagram Ven, Sketsa Desa teknis pelaksanaanya dilapangan dengan mengumpulakn warga secara informal, sementara wawancara dilakukan secara door to door menemui responden di rumahnya atau di tempat kerjanya. Respondennya

beragam, mulai dari buruh, petani, ibu rumah tangga, tokoh kunci di desa dan pengelola air irigasi dam minum.

b) Tindakan /Actualisasi II

Pada setiap kali diskusi bersama masyarakat, selalu ada kebutuhan-kebutuhan yang muncul; di Desa Beririjarak setelah melakukan diskusi terkait persoalan air bersih, masyarakat meminta untuk difasilitasi menyusun Perdes pengelolaan air bersih, yang mana kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukannya 3 kali pertemuan yang difasilitasi oleh ketua BPD menyusun draft Perdes. Di Desa Bebidas, kelompok HIPAM yang sudah terbentuk meminta untuk difasilitasi menyusun rencana kerja kelompok, begitu juga dengan kelompok perempuan di Desa Sapit meminta untuk difasilitasi melakukan pembenahan kelompoknya. Akan tetapi, sampai saat ini belum bisa direalisasikan karena di Desa Sapit terbentur dengan suasana pemilihan kepala desa.

c) Koleksi dan Analisis Data II

Koleksi dan analisis data pada tahap II ini juga prosesnya sama dengan yang dilakukan pada tahap I, yaitu secara berulang-ulang (*cylical*) melakukan pengumpulan data. Hasil kajian tahap awal ditelaah ulang setelah ditambahkan dengan informasi dan data baru hasil kajian tahap II, lalu kemudian dilakukan telaah lagi secara menyeluruh untuk melihat bagian mana saja yang membutuhkan informasi baru.

d) Refleksi II

Hasil kajian yang sudah beberapa kali dianalisis dan dipertajam datanya kemudian direfleksikan kembali untuk mendapatkan masukan kritis dari elemen masyarakat. Kegiatan refleksi tahap 2 dikemas dalam kegiatan Seminar.

Untuk memantau keberlanjutan kelompok-kelompok yang sudah terbentuk dari proses PAR, dilakukan pemantauan secara rutin dengan melakukan kunjungan ke lapang 1 kali dalam 1 minggu.

C. LOKASI

Penelitian dilakukan di 5 (Lima) desa, yaitu Desa Sapit, Suela, Bebidas dan Berirjarak yang berada di dalam kawasan SUB Das Pohgading Sunggen di Kecamatan Suela dan Wanasaba, dan 1 (Satu) desa lainnya, yaitu Desa Jurit Baru yang berada dalam kawasan SUB Das Pancor Barong Kecamatan Pringgasele kabupaten Lombok Timur.

D. WAKTU

Penelitian telah dilakukan selama 6 bulan yang sudah dimulai sejak bulan Desember 2013 sampai dengan Mei 2013. Dalam enam bulan tersebut, kegiatan dibagi menjadi dua tahapan; Tahap I (pertama) dilakukan pada bulan Desember 2013 - Maret 2013. Kegiatan pada tahap pertama adalah melakukan penggalan data dan informasi dan merencanakan tindakan-tindakan lanjutan yang dibutuhkan masyarakat. Tahap II (Dua) dilakukan mulai bulan April 2013-Mei 2013.

Kegiatan yang dilakukan adalah melengkapi data-data dan informasi yang belum akurat dan lengkap, serta mengembangkan keberadaan kelompok-kelompok yang sudah dibentuk.

E. PARTISIPAN

Unsur peserta yang dilibatkan saat melakukan FGD beragam, yang terdiri dari unsur Pemerintah desa, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Kelompok perempuan usaha produktif, Kader Posyandu, Petani, Buruh tani, guru, pedagang, ada juga yang berprofesi sebagai PNS, pemuda dan Lang-lang Gawah (petugas

kehutanan). Jumlah peserta yang terlibat bervariasi, ada yang 20 orang, bahkan ada juga yang sampai melebihi target, yaitu 36 orang.

F. PENGGALIAN DATA

Penggalian data dilakukan melalui FGD dengan mengumpulkan warga dari beragam profesi di satu tempat. Agar diskusi terarah dan terfokus, maka penggalian data dan informasi dipandu dengan menggunakan 8 jenis alat kajian, yaitu Sketsa desa, kalender kerja harian, kalender musim, akses dan kontrol dalam PSDA, Alur sejarah, Sumber mata pencaharian, Anso gender dan Diagram Venn.

Selanjutnya, data dan informasi yang belum diperoleh melalui FGD dilengkapi dengan melakukan wawancara semi terstruktur dengan mendatangi responden yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Untuk data sekundernya diperoleh melalui profil desa dan *Fildnote* untuk melengkapi data primernya.

BAB IV

KARAKTERISTIK WILAYAH PENELITIAN

A. Keadaan Umum

Lombok merupakan salah satu pulau kecil yang merupakan penghubung Benua Asia dan Benua Australia. Lombok sendiri mempunyai beberapa klaim internasional, salah satunya Lombok merupakan pulau pertama yang disinggahi Alfred Wallace dan dijadikan sebagai batas pembeda fauna dan flora antara Bagian Timur Indonesia dan Bagian Barat Indonesia. Sementara itu, dalam Babad Selaparang, Pulau Lombok dikenal dengan istilah *Gumi Sasak* atau *Gumi Selaparang* (Raba dan Asmawati, 2002: 49).

Nama *Selaparang* ini pun terdapat dalam surat perjanjian antara Hendrik Djakob Husmus Koppeman, seorang komisaris gubernur Hindia Belanda, dengan Gusti Ketut Karang Asam. Dalam surat ini disebutkan bahwa Ketut Karang Asam adalah raja di Pulau Selaparang (Djelenga, t.t.: 131-133). Nama *Gumi Selaparang* juga dijumpai dalam surat Anak Agung Ngurah Karang Asem kepada G.G. Merkus di Batavia tanggal 23 September 1843, menyebutkan kerajaan Mataram di Pulau Selaparang.

Suku Bangsa Sasak adalah penduduk asli dan merupakan kelompok suku bangsa mayoritas yang mendiami Pulau Lombok. Mereka meliputi lebih dari 92 % dari keseluruhan penduduk Pulau Lombok. Kelompok-kelompok suku bangsa, seperti Bali, Samawa, Arab, Jawa, Cina, Timor, dan lainnya adalah pendatang. Di antara suku pendatang tersebut, orang-orang Bali merupakan kelompok suku bangsa terbesar, meliputi sekitar 3 % dari keseluruhan penduduk Pulau Lombok. Jumlah kedua terbesar dari kelompok pendatang adalah orang-orang dari suku Bangsa Samawa dari Pulau Sumbawa bagian barat.

Adapun asal usul suku Bangsa Sasak masih menjadi perbincangan serius para ahli sejarah, sebab sampai saat ini belum pernah dilakukan penelitian yang

seksama. Berangkat dari beberapa catatan etnografis dapat dikatakan bahwa suku bangsa Sasak adalah bagian dari penetrasi atau keturunan suku bangsa Jawa yang menyeberang ke Pulau Bali dan selanjutnya ke Pulau Lombok, dimulai sejak zaman kerajaan Daha, Kalingga, Singosari, sampai Mataram Hindu. Terlebih pada tahun 1518-1521 penyeberangan migran Jawa ke Lombok semakin meningkat, maka oleh karena itu kebudayaan Sasak terwujud dari percampuran antara kebudayaan Jawa, kebudayaan Bali, dan kebudayaan Melayu Islam. Van Vollenhoven pun menggabungkan Lombok dan Bali dalam satu wilayah lingkungan adat. Penggabungan ini didasarkan atas banyaknya kesamaan adat istiadat di kedua daerah tersebut (Arzaki, 2000: 6).

Pulau Lombok termasuk wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat memiliki satu Kota Madya (Kodya) yaitu Mataram, dan tiga wilayah kabupaten, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Secara geografis Kabupaten Lombok Timur terletak antara 116^0 - 117^0 BT dan 8^0 - 9^0 LS. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah $2.679,88 \text{ km}^2$, terdiri dari daratan seluas $1.605,55 \text{ km}^2$ (59,91%) dan lautan seluas $1.074,33 \text{ km}^2$ (40,09%).

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan salah satu pembagian wilayah yang didasarkan atas pendekatan ekosistem sungai/hidrologis yang diintegrasikan berdasarkan karakteristik cekungan geologis (daerah tangkapan air). Kondisi dan karakteristik DAS, terkait erat dengan karakteristik komponen di dalamnya baik aspek biofisik maupun nonbiofisik.

Propinsi Nusa Tenggara Barat saat ini terbagi atas 22 (Dua puluh dua) DAS, diantaranya adalah DAS menanga yang berada di wilayah administratif Kabupaten Lombok Timur. DAS Menanga terbagi atas Sub DAS Pohgading Sunggen, Labuhan Lombok, Pancor Barong, Runtak Palung, Maronggek dan Segara Pringga Baya. Sub DAS Pohgading Sunggen meliputi wilayah kecamatan Suela dan Wanasaba, sedangkan Sub DAS Pancor Barong meliputi wilayah Kecamatan Pringga Sela dan Masbagik.

Kawasan Sub DAS Pohgading Sunggen terletak di lingkaran Gunung Rinjani. Secara topografis, kawasan ini berada pada ketinggian antara 320 - 700 mdpl dengan kontur variatif, dari kondisi yang berbukit hingga yang berbentuk dataran. Namun, sebagian besar kontur wilayahnya datar. Curah hujannya rata-rata berkisar antara 1.000 – 3.000 mm/tahun dengan suhu rata – rata $\pm 20^0 - 35^0$ C.

Kawasan ini berbatasan di sebelah Utara dengan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), wilayah Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Sembelia; Sebelah Selatan dengan wilayah Kecamatan Aikmel, Kecamatan Wanasaba dan Kecamatan Pringgabaya; Sebelah Timur dengan wilayah Kecamatan Pringgabaya dan sebelah Barat dengan wilayah Kecamatan Aikmel.

Secara orbitrasi, wilayah kawasan ini dapat ditempuh dengan jarak terpanjang 25 km dari ibu kota kabupaten dan 73 km dari ibu kota provinsi.

Desa Sapit, Suela, Bebidas dan Beririjarak berada dalam kawasan Sub DAS Pohgading Sunggen, meliputi Dua kecamatan, yaitu Suela dan Wanasaba. Desa Suela dan Sapit berada dalam wilayah Kecamatan Suela, sedangkan Desa Bebidas dan Beririjarak berada dalam wilayah Kecamatan Wanasaba Lombok Timur. Keempat desa tersebut letaknya tidak berjauhan, tidak terpisah oleh keberadaan desa lain, hanya dibatasi oleh sungai dan jalan. Sehingga hubungan emosi warganya secara emosi cukup dekat, hubungan kekeluargaannya juga cukup erat, karena banyak diantara warganya yang membangun ikatan perkawinan antar warga desa tersebut. Sedangkan Desa Jurit Baru, berada di kawasan Sub DAS Pancor Barong Kecamatan Pringasele Lombok Timur, letaknya cukup berjauhan dengan 4 desa lainnya. Sehingga ikatan secara emosi sangat jauh dengan 4 desa lainnya. Sub DAS Pancor Barong juga merupakan kawasan lingkaran Rinjani. Secara geografis dan topografis kondisinya relatif sama dengan kawasan Sub DAS Pohgading Sunggen.

Secara umum 5 desa kawasan memiliki ciri topografis berbukit dengan ketinggian 400-600 mdpl. Suhu rata-rata $20-35^0$ C dengan curah hujan rata-rata 2000-4000 mm. Dalam kondisi iklim yang normal, musim hujan di 5 desa kawasan rata-rata 6 bulan yang dimulai pada bulan November-April setiap tahunnya. Namun,

terjadinya pemanasan global telah menyebabkan perubahan iklim yang kemudian berdampak pada anomali cuaca yang tidak bisa diprediksi. Musim hujan tidak lagi 6 bulan, namun bisa saja terjadi sepanjang tahun. Kalender musim yang di buat oleh masyarakat di 5 desa kawasan yang disesuaikan dengan kondisi pada waktu kajian dilakukan menunjukkan kondisi yang sama, yang mana musim hujan dimulai pada bulan Januari – Mei.

B. Penduduk dan Mata Pencaharian

B.3. Demografi

Desa Beririjarak memiliki luas wilayah 1.047 ha dengan jumlah penduduk 5.127 jiwa yang terdiri dari 2.513 jiwa laki-laki dan 2.614 jiwa perempuan. Desa Bebidas memiliki jumlah penduduk 12.348 jiwa atau 3.693 KK dengan luas wilayah 2.463 ha. Sedangkan Desa Jurit Baru memiliki penduduk berjumlah 7241 Jiwa atau 2208 KK yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 3.630 Jiwa dan perempuan 3.611 jiwa dengan luas wilayah total luas 613.44 ha. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Desa Sapit mencapai 3,973 (1,325 KK) terdiri dari laki-laki 1.927 jiwa (49 %) dan perempuan 2.046 jiwa (51 %). Selanjutnya Desa Suela memiliki jumlah penduduk berdasarkan profil desa tahun 2010 mencapai 7377 jiwa atau 1276 KK yang terdiri dari 3718 jiwa perempuan dan 3659 jiwa laki-laki.

Desa Sapit dan Desa Suela merupakan desa tua yang sudah ada sejak zaman penjajahan belanda, sedangkan 3 desa lainnya, yaitu Desa Beririjarak, Desa Bebidas dan Sapit adalah desa baru didirikan. Desa Beririjarak dan Bebidas merupakan mekaran Desa Karang Baru. Akan tetapi Desa Bebidas berdiri lebih dahulu dengan Beririjarak. Desa Bebidas mekar pada tahun 2004, sedangkan Desa Beririjarak mekar tahun 2011 bersamaan dengan Desa Jurit baru yang dimekarkan tahun 2011 juga.

Penduduk Kelima desa kawasan keseluruhannya berjumlah 36.066 jiwa. Desa yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Desa Bebidas, yaitu 12.348 jiwa, kemudian Desa Suela berjumlah 7377 jiwa, di susul Desa Jurit Baru 7241 Jiwa selisih hanya 36 jiwa dengan jumlah penduduk Desa Suela,

yang terahir adalah Desa Sapit berjumlah 3,973 jiwa merupakan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit diantara 5 desa lainnya lokasi kajian.

B.3. Mata Pencaharian

Dilihat dari segi mata pencaharian, penduduk 5 Desa kawasan termasuk kompleks dengan berbagai jenis pekerjaan dimiliki oleh warganya, mulai dari petani, buruh tani, peternak, nelayan dan lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2011, perbandingan penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani/buruh tani 61,93 %, buruh/karyawan swasta sebanyak 12,89 %, pegawai negeri sebanyak 1,49 %, pengrajin sebanyak 1,14 %, pedagang sebanyak 4,55 %, peternak sebanyak 8,78 %, nelayan sebanyak 9,04 %, montir sebanyak 0,12 %, dokter 0,01 %, dan TNI/Polri sebanyak 0,02 %.

Pluralitas mata pencaharian penduduk memperlihatkan bahwa sekitar separuh dari angkatan kerja yang ada di lokasi penelitian adalah petani, buruh tani, dan buruh/swasta. Buruh yang pertama sifat pekerjaannya lebih mantap, dalam arti tingkat kelangsungannya lebih panjang dan menetap, sedangkan buruh kategori kedua sifat pekerjaannya tidak mantap, artinya sewaktu-waktu dapat berhenti bekerja baik karena pekerjaannya yang sudah selesai atau karena tidak dipakai lagi. Selain itu lokasi pekerjaannya selalu berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, baik di wilayah desa setempat maupun luar desa dan kadang luar kecamatan ataupun kota.

Bertani dan beternak merupakan mata pencaharian utama masyarakat desa kawasan, karena didukung oleh tanah yang subur. Sehingga sebagian besar penduduk dalam kehidupan sehari-hari sangat menggantungkan diri pada hasil alam atau pertanian. Selama musim hujan sawah ditanami Padi, yang sebelumnya ditabur dipersemaian, setelah berselang satu sampai dua bulan, tanaman Padi yang muda itu dipindahkan ke sawah.

B.3.Sosial Budaya

Kondisi sosial dan budaya masyarakat pertama-tama dapat dilihat dalam pergaulan sehari-hari. Dalam tata pergaulan, bahasa yang digunakan sangat penting untuk diketahui, sebab dengan pengungkapan bahasa, selain bahasa sebagai alat komunikasi paling efektif di masyarakat, namun juga ada hubungannya dengan tata kelakuan di lingkungan pergaulan warganya, seperti dalam pemakaian bahasa Sasak-Lombok, perlu diperhatikan tingkat-tingkat penggunaannya. Secara tradisional masyarakat Sasak dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu: *Perwangse*, *Kawula (Jajar Karang/Bulu Ketujur)*, dan *Panjak*. Sehingga dari penggolongan ini bahasa yang digunakan juga berbeda-beda (Mahyuni, 2001, dan Cederroth, dalam Kementerian Penerangan RI, t.t: 128).

Mengenai bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat Desa kawasan, dalam suasana tidak resmi adalah bahasa Sasak dengan dialek *Nggto-nggte*. Dilake seperti ini digunakan oleh masyarakat Desa Sapit, Suela, Bebidas dan Beririjarak. Sedangkan Desa Jurit Baru menggunakan dialek sasak yang berbeda, yakni *Ngeno-nene*. Demikian pula bahasa Indonesia, pada umumnya digunakan pada pertemuan-pertemuan formal, khususnya di sekolah-sekolah, akan tetapi dalam pertemuan-pertemuan seperti dalam sarasehan atau pertemuan yang diselenggarakan pada tingkat desa, *dasan*, rukun tetangga (RT), dan rukun warga (RW), masing sering menggunakan Bahasa Sasak yang dicampur dengan bahasa indonesia, maka dengan demikian perilaku hidup masyarakat Desa kawasan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Siklus Hidup

Masyarakat Desa kawasan yang tinggal di desa maupun *dasan* masih beranggapan dan memegang kuat, bahwa tiap perubahan yang fundamental hidup seseorang perlu di'*selamet*'kan, agar perubahan-perubahan tersebut mendapat keberkahan. Perubahan tersebut terjadi secara bertahap dalam kehidupan manusia, baik berdasarkan usia, mata

pencapaian, pangkatan dan lain sebagainya. Semua itu sebagai suatu tahapan atau langkah yang penuh ujian dan membahayakan, maka perlu setidaknya-tidaknya diiringi do'a, agar tidak berakibat buruk kepada dirinya, seperti do'a selamat, *haul*, dan lain sebagainya berupa permohonan perlindungan atau keselamatan dari Allah Swt., khusus mengenai siklus hidup perorangan dikalangan masyarakat desa kawasan terbagi dalam beberapa tahap sesuai dengan kejadian-kejadian penting dalam usia-usia tertentu dalam hidupnya, terjadi dan dijalani sekali saja dalam hidup. Adapun mengenai tahapan-tahapan tersebut, yaitu:

- *Retes embet* (selamatan perut) atau *melak tangkel* (memecahkan tempurung). Upacara bagi kandungan pertama setelah berumur tujuh bulan, maka diadakan selamatan perut untuk keselamatan ibu dan janin di dalam kandungan, agar kelahiran bayi dan ibunya selamat. Selamatan ini disebut dengan *melak tangkel*, atau identik dengan *tingkepan* (Jawa) atau *peled kandung* (Madura).
- *Molang mali'* (buang abu atau perak api). Upacara untuk menjaga kesehatan bayi pada usia 7 sampai 9 hari setelah dilahirkan, kemudian pemberian nama.
- *Bekuris* (potong rambut). Upacara yang dilaksanakan setelah bayi berumur 44 hari.
- *Nyunatang* (khitanan). Upacara khitanan untuk anak laki-laki, dilaksanakan secara bervariasi sesuai dengan kesiapan orang tuanya.
- *Khataman Qur'an*. Upacara bagi anak yang sudah mau akan tamat mengaji Qur'an, biasanya diiringi dengan memberikan sesuatu kepada tuan guru atau guru ngaji sebagai ucapan syukur.

Siklus hidup di atas, masih dipertahankan oleh masyarakat desa desa kawasan sebagai suatu sistem yang masih bersifat turun temurun, meski pada dasarnya telah terjadi pergeseran dan perbenturan sistem nilai-nilai lokal dengan arus globalisasi yang melanda masyarakat saat ini.

2. Perkawinan dan Kekerabatan

Adapun sistem perkawinan yang berlaku pada masyarakat desa kawasan yang masih berkembang, yaitu dengan cara sebagai berikut: perondongan (perjodohan), merarik lamar (kawin lamar), dan selarian (kawin lari). Adapun maksud dari cara-cara tersebut Pertama, seorang anak sudah dijodohkan semasa anak-anak karena adanya ikatan kekeluargaan atau persahabatan. Anak yang sudah dijodohkan akan diberitahu pada saat pernikahan telah dekat, karena sifat kawin ini terpaksa, dan model kawin ini disebut dengan pertama, kawin tadong; kedua, merarik lamar. Bentuk perkawinan yang oleh sebagian orang dalam masyarakat desa kawasan yang tidak memperkenankan adat midang (apel), sehingga dalam proses pacaran memakai seorang subandar (perantara), kemudian setelah merasa sudah akrab baru diadakan proses lamaran, dan Ketiga, selarian (kawin lari). Sistem perkawinan ini paling umum di pulau Lombok, termasuk di desa kawasan sistem perkawinan ini masih berlaku dari dulu sampai sekarang.

Secara umum, pengaruh adat dan orang tua memegang peran penting dalam masalah perkawinan di dalam kehidupan masyarakat desa kawasan, terutama dalam kehidupan masyarakat di kalangan bangsawan dan tuan guru, karena perkawinan masih terikat dengan agama, penentuan hari baik dan masalah keturunan, sedangkan sistem kekerabatan Scott (1993: 19) mengungkapkan sebagai berikut :

“....kesatuan kekerabatan sering pula disebut kelompok kekerabatan (kingroup) yang diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan manusia yang terikat oleh unsur-unsur tertentu, terutama ikatan kekerabatan, baik karena hubungan darah (genealogis) maupun karena hubungan perkawinan. Ikatan kekerabatan merupakan satu-satunya unit yang bersifat biologis, merupakan jaringan yang paling kohesif dan handal. Ikatan kekerabatan merupakan model ide solidaritas bagi unit-unit perlindungan lain.”

Dapat diketahui sistem kekerabatan masyarakat desa kawasan berdasarkan atas hubungan *patrilineal* dan diiringi dengan pola mantap *patrilikal*. Kesatuan kekerabatan sangat penting artinya dikalangan masyarakat desakawasan, karena sistem ini lebih besar dibandingkan dengan keluarga batih yang dalam bahasa Sasak-Lombok disebut dengan *kadang waris*. *Kadang waris* adalah suatu kelompok yang bersifat patrilineal, dalam sistem ini rumah dianggap sebagai suatu sistem kesatuan dari laki-laki yang telah kawin.

Suatu rumah di Desa kawasan biasanya terdiri dari suatu keluarga batih yang bersifat monogami juga sering ditambah dengan anak-anak yang menumpang atau yang masih kerabat atau *anak akon* (anak angkat). Karena *poligini* diizinkan maka ada juga keluarga batih yang bersifat *poligini*, apabila seorang anak-anak laki yang sudah kawin, maka ia akan membuat rumah baru di sekitar rumah orang tuanya, maka rumah tangga yang sudah tua terdiri dari keluarga *senior* dan keluarga *junior* hidup bersama dalam suatu kompleks *suntran* atau *suteraan* (perumahan). Tiap-tiap keluarga batih, merupakan keluarga luas di dalam sebuah desa dan saling menjalin hubungannya (*kandang jari* atau *kadang jari*).

Keluarga atau *koren* pada masyarakat desa kawasan terjadi akibat perkawinan. Kesatuan ini mengurus ekonomi rumah tangga. Suatu rumah tangga terdiri dari satu keluarga inti atau lebih, sedangkan di kalangan suku Bangsa Sasak secara umum, termasuk desa kawasan keluarga muda yang baru kawin sering menumpang pada yang tua, dan salah satu pihak untuk beberapa waktu atau sampai keluarga muda itu mempunyai anak. Bagi masyarakatdesa kawasan, keluarga muda tinggal di pusat kerabat suami, jarang sekali yang tinggal dilingkungan kerabat istri. Bagi keluarga yang tinggal di lingkungan keluarga istri (*uxorilokal*) disebut *bau isi'penjepit* atau *bau isi'pemanggang*. Dalam suatu rumah tangga terdapat ibu, ayah, dan anak-anaknya, mungkin juga anak tirinya atau anak angkatnya (*anak peras*).

Dalam kehidupan sehari-hari anak-anak lebih dekat dengan ibunya, malah dalam sistem pendidikan tradisional anak-anak dilatih dan dididik supaya jangan terlalu dekat hubungannya dengan ayahnya. Anak-anak berkumpul dengan ayahnya hanyalah bila perlu saja. Pada waktu makan anak-anak makan bersama ibunya, dan pada waktu ayahnya makan mereka harus menjauh. Tertib sopan santun terhadap ayahnya sangat diperhatikan jika dibandingkan dengan sikap, tertib sopan santun terhadap ibu mereka, akibatnya ayah menjadi berwibawa dan disegani oleh anak-anaknya. Tertib dan sopan santun yang demikian itu dimulai sejak anak-anak mulai memahami tentang salah dan benar.

Dengan demikian hubungan dengan di luar keluarga, karena masyarakat desa kawasan hidup dari bercocok tanam, berternak, dan nelayan hal ini dapat dilihat dari pola perkampungan-pola perkampungan terpencar, maka Desa Jerowaru terdiri dari sekumpulan *dasan* (dusun, kampung). *Dasan* bukanlah merupakan kesatuan hukum, *dasan* terdiri dari *gubug-gubug*. Tiap-tiap *gubug* merupakan kesatuan kerabat (*genealogis*), antara *gubug* yang satu dengan yang lain dipisahkan oleh *pengorong* (lorong atau pagar hidup). Di dalam tiap-tiap *gubug* terdapat beberapa buah rumah keluarga yang satu sama lain mempunyai ikatan kekerabatan karena tunggal darah.

3. Pewarisan

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilihan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Dalam terminolog *fiqh* biasanya dikemukakan pengertian kebahasaan. Pewarisan berasal dari kata *waris*, berasal dari kata bahasa Arab, *warasa*, bentuk jamaknya adalah *mawaris* yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris, sedangkan pengertian terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur

pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.

Menurut Ash-Shiddieqy (2000: 8), bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya, sedangkan Projodikoro (1983: 13) mengemukakan bahwa warisan adalah soal apa dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *faraid*. *Faraid* merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *faridah*, artinya ketentuan. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam al-Qur'an, meskipun dalam relasinya sering tidak tepat secara persis nominalnya.

Ahli waris dibagi menjadi dua macam, yaitu ahli waris *nasabiyah* dan ahli waris *sababiyah*. Adapun maksudnya yang *pertama*, ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan), dan *kedua*, ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena sesuatu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak. Menurut sebagian madzhab Hanafiyah, karena sebab perjanjian, di Indonesia tidak lagi begitu populer, karena hampir tidak pernah diketahui ada yang mempraktikkannya, maka sistem pewarisan yang berlaku pada masyarakat Lombok, termasuk di desa kawasan berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya yang masih berorientasi pada hukum adat. Di kalangan masyarakat Lombok hukum waris Islamlah yang sangat menentukan, sehingga penyelesaian sengketa waris selalu melalui pengadilan agama, akan tetapi tidak menutup cara-cara penyelesaian hak waris yang lain selama hal tersebut dikehendaki oleh semua pihak yang bersangkutan (ahli waris) dan tidak menimbulkan konflik. Hal ini antara

lain dapat dilihat dalam harta “bawaan” suami dalam perkawinan. Jika terjadi perceraian maka harta tersebut dapat dibawa pulang kembali.

Pada umumnya sistem warisan di kalangan masyarakat desa kawasan masih mengikuti sistem warisan Islam. Tujuan utamanya untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan tentang timbulnya konflik dikemudian hari. Oleh karena itu dalam penyelesaian para ahli waris dihadapkan dengan sanksi-sanksi rohani (hukum Allah Swt), yang tidak memungkinkan terjadinya gugatan-gugatan dikemudian hari, kalau si penggugat (turunan ahli waris) tidak ingin dasingkan oleh masyarakat muslim di desa kawasan.

4. Stratifikasi Sosial

Menurut Cederroth (Kementerian Penerangan RI, t.t.: 128), stratifikasi masyarakat Sasak digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu *Pertama*, golongan *Perwangsa*, merupakan golongan bangsawan yang terbagi lagi berdasarkan gelar kebangsawanan yaitu *Datu, Raden*; *Kedua*, golongan *Kawula (Jajar Karang)*, petani bebas yang terdiri atas kelas *Lupat* dan *Pengayah*, dan *Ketiga, Panjak*, yaitu kelompok petani yang menjadi klien seorang patron. Dahulunya adalah petani dari daerah taklukan yang dipekerjakan di tanah bangsawan. Namun masyarakat Sasak di kawasan terbagi atas tiga golongan berdasarkan stratifikasi sosial tidak resmi yaitu bangsawan tertinggi (*Perwangse*), bangsawan menengah (*Lalu/Bapa/Buling*) dan kelompok masyarakat biasa (*Jajar Karang*).

Sistem strata ini telah menempatkan masyarakat Sasak dalam hal kepemilikan tanah sesuai dengan stratifikasi sosialnya. Golongan tertinggi dan menengah adalah kelompok pemilik lahan pertanian yang luas tanahnya berhektar-berhektar. Sementara golongan *jajar karang* hanya memiliki luas tanah sekitar 20 are sampai tiga perempat hektar. Sedikitnya penguasaan tanah mereka banyak disebabkan oleh tanah tersebut hanya dikerjakan oleh satu keluarga saja, sehingga kekurangan

tenaga kerja. Untuk menambah pendapatan keluarga, kelompok *jajar karang* bekerja di lahan para bangsawan dengan sistem bagi hasil.

Pada masa sekarang, sistem stratifikasi sosial tersebut pada beberapa daerah di Lombok Timur sudah ditinggalkan, karena dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, selain itu kemajuan di bidang pendidikan turut mempengaruhi terabaikannya stratifikasi tersebut. Hubungan sosial yang ada menjadi lebih terbuka dan pembatasan berdasarkan garis keturunan tidak lagi menjadi penentu. Dominasi golongan *perwangse* mulai bergeser dengan munculnya kelompok masyarakat terpelajar. Dengan demikian untuk masyarakat yang tinggal di desa kawasan stratifikasi sosial ini sudah mengalami pergeseran dan didominasi oleh kelompok intelektual dan cendekiawan.

5. Organisasi Sosial

Wilayah desa ini terbagi ke dalam beberapa dusun disebut dengan istilah *dasan* atau *gubuk*. Letak antara kampung satu dengan kampung lainnya terpisah oleh sawah, ladang, dan sungai. Pemukiman penduduk terletak di *tanak gubuk*, yang tidak jelas batas-batas pekarangannya, tidak seperti pemukiman orang-orang Bali di Lombok Barat yang memiliki batas-batas yang jelas, yaitu pekarangan dengan lorong-lorong atau gang yang teratur. Selain itu, setiap *dasan* selalu dilengkapi dengan sarana peribadatan yaitu masjid yang jumlahnya lebih dari satu serta sebuah kompleks makam.

Suku bangsa Sasak di desa kawasan tidak berasal dari satu nenek moyang yang sama (*giucalogis*), tetapi merupakan masyarakat teritorial. Mereka terikat dalam satu kesatuan hunian yang sama di bawah pimpinan seorang kepala desa. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975, desa dipimpin oleh seorang *pemekel* (kepala desa). Di setiap *dasan* (dusun) dibantu oleh *jerowarah* (pembantu) dan beberapa orang *pemeket* (Hansip). Masyarakat yang mendiami wilayah desa kawasan di sebut *kanoman*. Semua unsur tersebut tergabung dalam *krama desa* untuk di

tingkat desa dan *krama gubuk* untuk tingkat dusun (Arzaki, 2001: 18-20, Amin, 1997: 181).

Selain itu, di setiap dusun mempunyai dua organisasi sosial, yaitu *subak* dan *banjar*. *Subak* adalah organisasi yang mengatur pengairan daerah persawahan dari sumber mata air yang sama. Semua kegiatan tersebut dilakukan di bawah pimpinan seorang *pekasih*. *Pekasih* ini dipilih berdasarkan musyawarah *subak* yang disebut dengan *sangkepan*. Kriteria seorang *pekasih* adalah mampu bersikap jujur, adil, dan bijaksana, untuk seorang *pekasih* diberikan sebidang *tanah pecatu* sebagai kompensasi atas tugas yang diembannya (Arzaki, 2001: 18, Amin, 1997: 58-59).

Banjar adalah organisasi dalam penyelenggaraan adat atau urusan kemasyarakatan, namun kewenangan *banjar* hanya menyangkut urusan kematian dan perkawinan. Setiap bulannya para anggota *banjar* diwajibkan untuk menyerahkan iuran. Iuran ini nantinya akan digunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan kegiatan perkawinan dan kematian. Saat ini besarnya iuran ditentukan oleh kepala dusun, dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi warganya. Pimpinan perkumpulan yang disebut *ketua banjar* dipilih melalui musyawarah anggotanya (*guremi*) dengan cara aklamasi, sedangkan *pekasih*, *ketua banjar* tidak diberikan kompensasi apapun atas tugas yang diembannya (Amin, 1997: 183).

6. Agama

Sebelum agama Islam masuk di Lombok, masyarakat Sasak merupakan komunitas yang telah memiliki kepercayaan lama, seperti pemujaan kepada roh nenek moyang. Pemujaan terhadap benda-benda dan tempat-tempat yang dianggap memiliki kekuatan *ghaib* merupakan sistem religi pra Islam. Selain itu, hubungan politik dengan Majapahit juga telah menyebabkan beberapa masyarakat yang tinggal di pulau Lombok telah memeluk agama Hindu, ada juga yang memeluk agama *Boda* (bukan

Budha). Reaksi dari gagasan lokal terhadap Islam mau tidak mau ikut memberikan corak dari bentuk Islamisasi yang ada. Misalnya munculnya sinkritisme antara Islam dengan religi lokal yang telah berakar kuat (Haris, 2002: 15).

Proses Islamisasi di Lombok berkisar antara abad ke-15 sampai ke-17 yang dilakukan oleh Pangeran Prapen dari Giri (Gresik). De Graff menyatakan bahwa pada paruh kedua abad ke-16 merupakan fase kemakmuran Giri (Gresik) sebagai pusat peradaban pesisir Islam sekaligus pusat ekspansi Jawa di bidang ekonomi politik di Indonesia Timur. Ekspansi ke Lombok tersebut berkaitan erat dengan usaha memperluas kekuasaan rohani serta hubungan dagang lewat laut ke arah timur (Haris, 2002: 16).

Penaklukan Islam terhadap Lombok tampaknya tidak terlalu sukses dari segi rohani, kendati pun secara kultur pengaruh Jawa cukup berhasil, hal ini nampak dari situasi keagamaan masyarakat Sasak sampai abad ke-20 masih banyak ditemukan agama *Boda* dan *Islam Wetu Telu*. Fenomena beragama masyarakat Lombok menunjukkan ciri yang sangat khas, karena adanya varian agama Islam, yakni *Islam Wetu Telu*. Ajaran *Islam Wetu Telu* masih menunjukkan adanya unsur sinkritis antara ajaran Islam dengan ajaran pra Islam, baik yang bersifat hinduisme, animisme, dan dinamisme, maupun yang bersifat *sufistik* (Haris, 2002: 21).

Semua penduduk desa kawasan beragama Islam dan agama Islam ini dijadikan sebagai sumber petunjuk moral yang mengontrol dan membatasi perilaku masyarakat. Tujuannya adalah mengarahkan dan menuntun masyarakat pada jalan yang benar, jalan yang membimbing masyarakat menuju keselamatan di dunia dan akhirat, selain itu agama Islam diyakini oleh masyarakat desa kawasan menjadi penerang dalam menciptakan dan menata lingkungan hidup yang harmonis dikalangan penduduk dan pemeluk agama lain.

Penduduk desa kawasan memeluk agama Islam dan taat menjalankan syariatnya, serta mayoritas mereka menganut paham *ahlussunah waljama'ah* dengan pengaruh kuat dari organisasi Islam terbesar di Nusa Tenggara Barat yaitu Nahdlatul Wathan (NW). Akan tetapi, pengaruh dari organisasi lain juga ikut mewarnai munculnya keberagaman praktik beragama pada masyarakat Lombok, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al Banna, Maraqitta'limat, Assunnah, bahkan ada juga penduduk yang meningkatkan ketakwaannya dengan mempelajari ajaran *tarekat naqsabandiyah*.

Kehidupan beragama pada masyarakat desa kawasan masih diwarnai kebudayaan pra Islam. Dalam hal ini keharusan adat dan agama hampir tidak dapat dibedakan, dalam kehidupan sehari-hari, bahwa masyarakat Sasak masih mempercayai adanya kekuatan ghaib yang mempengaruhi seseorang. Mereka percaya bahwa seseorang bisa disapa (*tesapaq*) oleh roh leluhurnya. Sapaan roh leluhur ini dapat menyebabkan seseorang sakit yang berkepanjangan. Peristiwa ini dalam bahasa Sasak disebut dengan *ketemuq*. Mereka yang *ketemuq* akan diobati oleh seorang dukun yang disebut dengan *belian*.

Hampir semua peristiwa dalam lingkaran hidup disertai dengan selamatan, mulai dari kelahiran, kematian, potong rambut, khitanan, perkawinan, *bayar kaul* (nazar), tolak bala, berangkat haji, usai panen, memperoleh keuntungan yang diharapkan ataupun yang tak terduga. *Selamatan* ini dihadiri oleh tetangga dan kerabat terdekat yang tinggal sekampung dengannya, upacara selamatan itu disebut biasanya diadakan dengan *tahlilan*, yang dipimpin oleh seorang tuan guru.

BAB V

KONSTRUKSI GENDER DALAM PENGELOLAAN SDA

A. Identifikasi Pengelolaan SDA

1. Hasil Kajian Partisipatif Tahap I

1.1 Beban Kerja Perempuan

Berdasarkan data yang diperoleh dari form isian yang diberikan kepada responden terkait *Kalender Kerja Harian* di 5 desa kawasan menunjukkan adanya perbedaan beban kerja yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari aktifitas keseharian warga.

Perempuan yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani setiap paginya mulai pukul 04.30 wita memiliki aktifitas relatif sama, yaitu sebangun tidur sudah mulai sibuk membersihkan lingkungan rumah, mencuci, mengurus anak dan menyiapkan sarapan pagi dan makan siang bagi keluarga.

Sementara laki-laki kegiatan yang tercatat adalah sarapan saja. Namun, berdasarkan penglihatan penulis selama berada di lokasi penelitian, setiap pagi sebelum berangkat kerja laki-laki menyiapkan peralatan kerja, membantu istri mengurus anak dan membersihkan lingkungan rumah, tetapi memang tidak menjadi kelaziman. Selanjutnya, pukul 06.30 wita baik laki-laki dan perempuan bersama-sama berangkat ke ladang atau sawah kemudian pulang pukul 17.00 wita. Sepulang dari bekerja pukul 17.00 – 20.00 wita perempuan belum berkesempatan beristirahat, karena harus menyiapkan makan malam keluarga, sedangkan laki-laki berkesempatan untuk beristirahat sementara makan malam disiapkan oleh istri. Pukul 20.00-22.00 wita, perempuan sudah selesai menyiapkan makan malam keluarga, barulah kemudian bisa beristirahat penuh sambil nonton TV bagi mereka yang memiliki TV.

Berikutnya adalah aktifitas warga yang berprofesi sebagai pedagang, mulai pukul 04.30 wita sudah bangun, baik suami ataupun istri; suami menyiapkan dagangan yang akan dijual ke pasar, istri menyiapkan sarapan untuk keluarga. Pada pukul 06.30 wita istri berangkat ke pasar sementara suami tinggal di rumah menjaga warung hingga pukul 10.00 wita. Sepulang dari pasar pukul 10.00 wita isteri menuju ke dapur untuk menyiapkan makan siang keluarga, sementara suami tetap menjaga dagangan hingga pukul 11.30 wita. Dari jam 11.30 sampai 12.00 biasanya menjadi jam makan siang dan tetap berdagang hingga pukul 21.00 wita.

Guru honor mulai jam 04.50 wita sudah bangun tidur, kegiatannya setelah shalat adalah berolah raga, membersihkan lingkungan rumah, menyiapkan perlengkapan mengajar yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Kecuali mencuci dan memasak dilakukan oleh perempuan, laki-laki hanya membantu. Hal ini dilakukan hingga pukul 06.30 wita. Selanjutnya, pukul 07.00 wita guru honor berangkat ke sekolah sampai pukul 13.00 wita. Pukul 13.00 wita sampai 16.00 wita laki-laki dan perempuan beristirahat. Selanjutnya pukul 16.00 wita sampai 17.00 wita laki-laki pergi jalan-jalan, sementara perempuan sudah mulai menyiapkan makan malam hingga pukul 20.00 wita. Aktifitas guru honor dan pegawai negeri pada umumnya adalah sama. Sehingga tidak perlu dijelaskan secara gamblang.

Berdasarkan ilustrasi di atas, mengindikasikan bahwa jam kerja dan pekerjaan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Perempuan juga memiliki beban ganda, selain mengurus rumah tangga, mereka juga bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Budaya patriarki yang sudah mengakar dan menjadi perilaku yang lumrah di masyarakat, memaksa perempuan menerima dan pasrah dengan beban ganda yang dilakoninya. Malahan menjadi keyakinan bagi mereka jika hal tersebut merupakan kodrat yang harus dijalankan.

11 Sumber Mata Pencaharian Warga

Berdasarkan dokumen peserta FGD yang menjelaskan tentang sumber mata pencaharian warga, Perempuan yang berprofesi sebagai guru honor mendapatkan gaji Rp.300.000/bulan, ada yang bekerja sebagai pegawai negeri dengan kisaran gaji antara Rp.2.400.000-Rp 3.400.000/bulan, ada juga yang bekerja sebagai pedagang dengan pendapatan rata-rata Rp.60.000-Rp.70.000/hari. Gaji terendah diperoleh oleh perempuan yang bekerja sebagai buruh tani, yaitu Rp.20.000-Rp.30.000/hari. Sedangkan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga tidak mendapatkan apa-apa, karena perempuan menganggap hal itu sudah menjadi kewajibannya.

Jenis profesi peserta laki-laki lebih banyak ragamnya, di antaranya adalah buruh tani dengan upah Rp.50.000-Rp.70.000/hari, petani dalam 1 ha memperoleh keuntungan Rp.10.000.000/6 bulan, pengepul sayuran memperoleh keuntungan Rp.3.000.000/bulan, guru honor Rp.300.000/bulan, mekanik Rp.750.000/bulan, sopir Rp.100.000/hari, PNS Rp.2.400.000-Rp.3.400.000/bulan, Kadus Rp.300.000/bulan, aktifis Rp.1000.000/bulan.

Pekaseh adalah sebutan bagi orang yang ditugaskan untuk mengatur pemanfaatan air irigasi, sebagai tempat para Penyakap (Petani) meminta jadwal pemanfaatan air irigasi. *Pekaseh* diberikan upah oleh petani yang jumlahnya tergantung luas lahan dan besar penghasilan petani. Bentuk upahnya tidak ditetapkan tergantung petani, bisa berupa uang tunai, bisa juga berupa hasil panen.

Menurut pengakuan petani yang mempekerjakan perempuan, perbedaan upah perempuan dengan laki-laki tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan perempuan, namun didasarkan pada proporsi dan beratnya pekerjaan. Membajak, mencangkul, memikul dianggap sebagai pekerjaan yang cukup berat bagi perempuan. Hal ini berkaitan dengan persepsi bahwa perempuan memiliki fisik lemah dan lembut. Sehingga, masyarakat memandang tidak pantas dilakukan oleh perempuan.

Akibatnya, pekerjaan tersebut lebih dipercayakan kepada laki-laki. Sedangkan pekerjaan yang lebih ringan, seperti penyiangan, pemupukan dan pemanenan lebih banyak dipercayakan kepada perempuan. Kepercayaan ini tidak semata-mata karena pekerjaannya lebih ringan, namun petani juga melihat perempuan lebih rajin dan waktu istirahatnya relatif kurang jika dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan istirahat hanya untuk makan dan shalat, sebaliknya laki-laki selama bekerja istirahatnya terlalu sering, misalnya merokok. Keadaan ini tidak dipersoalkan oleh perempuan, malahan dianggap sudah adil.

Penomena yang nampak saat ini di Lima desa kawasan adalah kegiatan penyiangan, pemupukan dan panen pada tanaman seperti Padi, Jagung, Tembakau dan sayur-sayuran buruhnya lebih didominasi oleh perempuan. Hal ini disebabkan karena buruh laki-laki semakin jarang yang disebabkan karena banyak yang pergi merantau sebagai TKI.

11 Kegiatan Penghidupan Masyarakat

Masyarakat 5 desa kawasan mengenal 3 musim, yaitu musim Hujan, Selak Musim dan Balit. Berdasarkan kalender musim di 5 desa kawasan, musim hujan berlangsung pada bulan Januari-Mei. Jenis tanaman yang dikembangkan petani pada musim ini sangat beragam, sebagian petani sawah pada umumnya menanam Padi, sayur-sayuran, Tomat dan Jagung. Kegiatan masyarakat dibagi menjadi 3 tahapan, antara lain (1) pembibitan dan pengolahan lahan. Pada tahap ini kegiatannya dipandang paling berat, sehingga pekerjaannya lebih dipercayakan kepada laki-laki. Jenis kegiatannya adalah laki-laki menyiapkan lahan, seperti: membajak untuk Padi, membuat bedengan untuk Tomat, sayur-sayuran dan Jagung. Sementara perempuan menyiapkan konsumsi atau bahasa lokalnya disebut *Manoang*. (2) Pemeliharaan. Tahapan ini pekerjaannya dipandang lebih ringan, sehingga dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Bentuk kegiatannya adalah menanam, *Ngeder* (penyiangan), pemupukan dan penyemprotan. Khusus penyemprotan umumnya

dilakukan oleh laki-laki, karena dipandang cukup berat dan kurang pantas dilakukan oleh perempuan. (3) Panen yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Hasil panen pada skala besar biasanya tidak dijual di pasar, akan tetapi para tengkulak langsung yang mendatangi lahan petani dan tawar menawar pun dilakukan di lahan. Data yang diperoleh dari hasil FGD, penjualan dalam skala besar dilakukan oleh laki-laki, pada skala kecil dilakukan oleh perempuan. Namun, berdasarkan pengamatan penulis yang melihat langsung di lapangan, dalam proses tawar menawar sebelum adanya penetapan harga dengan pembeli, antara suami dan istri berlangsung komunikasi sehingga akhirnya ada kesepakatan harga diantara mereka yang kemudian ditawarkan kepada pembeli. Fenomena yang nampak di tengah masyarakat berdasarkan hasil pengamatan penulis, penetapan harga tidak *un sich* menjadi kuasanya laki-laki, namun juga sebaliknyanya perempuan yang menentukan. Hal ini juga ditemukan oleh Habibudin (2007) dalam penelitiannya di Desa Jerowaru Lombok Timur *bahwa antara persepsi dan kenyataan faktual ternyata berbeda. Di satu sisi, kekuasaan atau wewenang perempuan sesungguhnya tersembunyi dalam isu-isu dan anggapan-anggapan normatif yang masih banyak dipercaya bahkan perempuan berada di bawah kekuasaan laki-laki dan tidak mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan padahal di sisi lain atau pada realitasnya hal itu kurang terbukti kebenarannya. Fakta yang ada menunjukkan bahwa wewenang perempuan justru besar dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana yang akan terlihat pada uraian pada bagian dibawah ini, bahwa sebagian besar keluarga telah menerapkan pola keputusan bersama seimbang bahkan dalam aspek-aspek tertentu dominasi perempuan (istri) terlihat demikian menonjol.*

Hasil panen pada jumlah yang kecil, misalnya sayur-sayuran dijual di pasar yang dilakukan oleh perempuan dan keputusan hargapun diberikan keleluasaan kepada perempuan untuk menentukannya berdasarkan kesepakatannya dengan pembeli tanpa harus menunggu persetujuan suami.

Di ladang, jenis tanaman musiman yang dikembangkan adalah Padi jenis Gogoranchah. Selama bulan April – Mei masyarakat menyebutnya sebagai musim *Matak* (panen Padi), kalau panen Padi di sawah disebut *Begabah*. Matak pada umumnya dilakukan oleh perempuan, begitu pula dengan begabah sekarang ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Pada saat begabah, perempuan yang tidak berburuh juga ikut Begabah, tetapi mereka ini datang untuk mengambil biji Padi yang tidak rontok saat digabah yang disebut dengan *Mespes*, hasilnya menjadi milik mereka.

Selak Musim dalam bahasa Indonesia adalah pergantian antara musim hujan ke musim panas atau sebaliknya pergantian dari musim panas ke musim hujan. *Selak Musim* hujan ke musim panas terjadi pada bulan Juni. Pada bulan ini, petani mulai melakukan pembibitan Tembakau Virginia. Sebenarnya bukan hanya Tembakau yang ditanam, jenis lainnya seperti Padi, Sayur-sayuran, Tomat dan Jagung juga banyak ditanam petani, namun yang paling banyak adalah Tembakau jenis Virginia. Memasuki bulan Juni petani sudah mulai menanam tembakau. Proses penanaman Tembakau sangat panjang, dari menimbun tanah, membuat alur-alur, mencabuti rumput-rumputan, menggemburkan tanah, memberi pupuk, menyemprot, menunasi, dan memetik, semua kegiatan selama masa pertumbuhan membutuhkan banyak pekerjaan, di samping waktu panen. Membuat alur-alur dan penyiangan adalah pekerjaan yang paling berat pada masa persiapan, sehingga dikerjakan oleh laki-laki. Sedangkan pekerjaan yang lainnya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, akan tetapi fenomena yang nampak saat ini, perempuan lebih mendominasi yang mengerjakannya. Kurangnya buruh laki-laki terkait dengan banyaknya jumlah laki-laki yang merantau sebagai TKI. Setelah panen, prosesnya berlanjut pada Pengovenan. Tahapan ini merupakan pengeringan daun Tembakau sebelum dijual ke perusahaan. Pengovenan cukup rumit, membutuhkan waktu, tenaga dan materi yang cukup, dari penyortiran daun, pengovenan dan pengikatan daun yang sudah kering. Budidaya Tembakau Virginia melalui proses yang cukup panjang dari olah lahan

sampai Tembakau siap dijual ke perusahaan, pengerjaannya membutuhkan banyak tenaga kerja dan modal besar, Satu buah oven saja membutuhkan puluhan tenaga kerja, dan yang banyak mengerjakannya adalah perempuan. Banyak petani naik haji kalau harga Tembakau mahal, namun jika harga rendah, sebaliknya banyak petani yang gulung tikar sampai menjual harta bendanya yang lain untuk membayar hutang, bahkan sudah ada kasusnya sampai mengoven dirinya sampai tewas. Musim Tembakau berlangsung selama 5 bulan mulai juni sampai bulan Agustus setiap tahunnya.

Bulan Juli – November masyarakat menyebutnya dengan musim *Balit* atau musim panas. Pada masa ini, debit mata semakin mengecil, sehingga petani mulai kesulitan untuk mendapatkan air. Oleh karena itu jenis tanaman yang dikembangkan adalah tanaman yang tidak membutuhkan banyak air, seperti jagung, Tembakau, Bawang Putih, Bawang Merah, Ubi jalar, Tomat dan Cabe. Di lahan ladang, tanaman yang biasanya dikembangkan adalah Jagung dan Singkong untuk memanfaatkan sisa-sisa musim hujan.

Puncak musim *Balit* mulai bulan Oktober-desember. Pada bulan ini, banyak lahan yang menganggur, kecuali lahan-lahan yang tidak jauh dari sumber air masih bisa menanam. Sementara di lahan ladang, tidak ada yang bisa ditanam, karena sudah kering kerontang, yang ada adalah semak-semak kering. Akibatnya, petani mulai menganggur apalagi mereka yang tidak memiliki lahan. Tidak banyak aktifitas warga, baik laki-laki atau perempuan. Laki-laki biasanya mengisi waktu dengan bermain catur, domino, sementara kaum perempuan mengisi waktu dengan kumpul-kumpul ngobrol yang tidak jelas juntrungannya sambil *Gegutu* (mencari kutu kepala).

Bulan Desember memasuki *Selak Musim* kedua, yaitu peralihan antara musim panas ke musim hujan. Bulan ini, bagi petani adalah masa *Muang Kepeng*. Istilah ini muncul karena pada bulan ini petani mulai

menyiapkan lahan, sehingga ketika musim hujan tiba lahan sudah siap ditanami. Untuk mengolah lahan tentu saja membutuhkan banyak biaya untuk membeli bibit dan membayar buruh. Karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan sehingga petani menyebutnya musim *Buang Kepeng*. Bagi para buruh, sebalaknya menjadi masa mendulang uang, karena permintaan pekerjaan cukup banyak, sampai-sampai tidak ada hari untuk beristirahat. Pada bulan ini, warga jarang berada di rumah, sehingga sulit mengumpulkan warga untuk berkumpul.

Hasil ngobrol-ngobrol dengan warga, mereka meyakini bahwa pola partisipasi gender dalam pengelolaan pertanian sudah adil, sesuai dengan kondisi dan kapasitas warga. Laki-laki mengerjakan pekerjaan fisik yang lebih berat sudah seyogyanya, dan tidaklah pantas jika dikerjakan oleh perempuan, karena juateru akan *memaksa* mereka mengerjakan hal-hal di luar batas kemampuan mereka, walaupun jika dipaksakan perempuan memang pasti akan mampu melakukannya. Namun hasilnya diyakini tidak akan sebaik yang dilakukan laki-laki.

11 Perkembangan Pengelolaan SDA

Hasil PAR terkait pengelolaan SDA di Lima desa menunjukkan adanya persamaan pola dalam pengelolaannya, baik di bidang kehutanan, pertanian dan perkebunan. Khusus dalam pengelolaan hutan, kondisinya relatif sama, partisipasi gendernya juga sama, namun model pengelolaannya yang berbeda.

Pada tahun sebelum 1999, kondisi hutan di 5 desa kawasan relatif masih cukup bagus kondisinya, kayu tegakan dengan diameter lebar dari berbagai jenis masih banyak ditemukan, hasil hutan bukan kayu (HHBK) cukup banyak, berbagai jenis binatang dan burung banyak berkeliaran sehingga cukup mudah menemukannya. Gemuruh kerasnya suara air yang mengalir di sepanjang sungai masih cukup keras terdengar dari kejauhan; di sepanjang hutan, titik air yang mengucur masih banyak ditemukan walaupun musim kering.

Meskipun debit mata air masih cukup besar, akan tetapi warga mengambil air di sungai. Lahan yang ada sebagian besar masih berupa perladangan, sementara lahan persawahan masih terbatas. Padahal, lahan perladangan yang ada bisa dikonversi menjadi lahan persawahan agar menjadi lebih produktif. Hal ini disebabkan karena pada waktu itu jaringan irigasi masih terbatas, belum dibangun jaringan air bersih ke kampung-kampung. Pemandangan yang nampak laki-laki dan perempuan setiap harinya lalu-lalang pergi ke sungai untuk mandi, mencuci dan mengambil air untuk minum di rumah. Perempuan memikul pakaian yang akan dicuci dan laki-laki memikul air.

Jenis tanaman yang dikembangkan pada waktu itu adalah Padi Gogoranch dengan masa panen lebih lama dibandingkan Padi zaman sekarang. Belum ada pupuk, tanaman tumbuh secara alami tanpa dipaksa pertumbuhannya dengan pupuk dan obat-obatan kimia. Pengolahan tanah menggunakan tenaga binatang, yaitu Sapi dibantu dengan tenaga manusia. Meskipun begitu, tanamannya tumbuh dengan baik dengan hasil yang tidak kalah kualitasnya dengan Padi sekarang.

Pengolahan lahan sampai pada panen dilakukan secara gotongroyong atau istilah lokalnya “Besiru.” Kegiatan Besiru dilakukan secara bergiliran, jika hari ini Besiru di lahannya Aq.Anto, maka besoknya lagi di lahan warga yang lainnya, begitu seterusnya sampai semua warga yang memiliki lahan mendapatkan giliran. Pemilik lahan hanya menyediakan konsumsi. Sebagai bentuk ucapan terimakasih, setelah panen warga saling hasil panen. Musim menanam Padi disebut dengan “Ngerau” dan musim panen Padi disebut “Matak.” Hasil panen tidak dijual, namun disimpan di dalam Lumbung untuk persediaan menghadapi musim paceklik.

Masyarakat memiliki tradisi tersendiri di dalam memperlakukan hutan, dan tradisi tersebut dijalankan dalam kehidupan mereka. Tradisi tersebut menjadi rambu-rambu bagi siapa saja yang mau memasuki hutan, dan jika dilanggar diyakini akan mendapatkan petaka. Sehingga, memasuki hutan

tidak bisa dilakukan secara sembarangan, namun harus melalui proses ritual dan meminta izin dari “Mangku Gawah.” Misalnya di Desa Sapit, ada namanya tradisi “Bebangar,” ini adalah tradisi meminta izin kepada Mangku Gawah sebelum memasuki hutan.

Mulai tahun 1990 sampai tahun 2000, kelebatan hutan sudah mulai berkurang, banyak kayu-kayu besar yang ditebang, lahan hutan dialihfungsikan menjadi perladangan di Desa Sapit dan dijadikan lahan perkebunan di Desa Suela. Debit mata air sudah mulai berkurang, sementara itu lahan pertanian semakin bertambah seiring dengan dibangunnya jaringan irigasi, begitu pula dengan air bersih, jaringan perpipaan sudah mulai dibangun, di setiap dusun dibangun bak-bak umum. Sehingga warga tidak lagi pergi ke sungai mengambil air, kecuali warga yang masih jauh aksesnya dari bak-bak umum. Beragam varietas padi yang mulai dikembangkan, Padi Gogorancah dianggap terlalu lama untuk dipanen, perlahan sebagian petani sudah tidak menanam Padi gogo lagi. Untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian, petani mulai diperkenalkan dengan berbagai jenis pupuk dan obat-obatan kimia.

Tradisi besiru mulai ditinggalkan, perlahan pola hidup warga sudah mulai individualis, keberlangsungan aktifitas bertani sangat tergantung dari kemampuan materi. Kebiasaan menyimpan Padi di lumbung sudah mulai jarang yang melakukannya, begitu panen hasilnya langsung dijual. Begitu juga tradisi meminta izin kepada *Mangku Gawar* untuk masuk hutan mulai ditinggalkan, orang sudah mulai sembarangan memasuki hutan tanpa seizin mangku.

Tahun 2000 -2013, semua pihak sudah mulai merasakan dampak dari kerusakan hutan. Masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki andil terhadap kondisi hutan yang sekarang ini, begitu pula pemerintah mulai menyadari bahwa ada yang salah dari kebijakan yang selama ini diterapkan dalam pengelolaan hutan. Oleh karena itu, pemerintah mulai melakukan evaluasi kemudian memformulasikan pendekatan dan strategi

berbeda dari sebelumnya dalam pengelolaan hutan, program konservasi digalakkan walaupun sampai sekarang masih gagal.

Permintaan dari konsumen terhadap hasil pertanian yang cukup tinggi menuntut petani untuk mempercepat masa panen dengan menanam varietas tanaman baru yang lebih cepat dipanen. Penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia dengan beragam jenis pun tidak terelakkan lagi. Akibatnya, kesuburan tanah sudah berkurang, berbagai jenis hama mulai menyerang tanaman. Begitu pula manusia, tidak luput terkena dampaknya, berbagai penyakit baru yang bersumber dari makanan hasil pertanian juga menyerang manusia.

Debit mata air yang ada di 5 desa kawasan mulai mengecil, bahkan sudah ada yang tidak aktif lagi. Sementara jumlah penduduk dan lahan irigasi di 5 desa ini semakin meningkat. Permukiman-permukiman yang tinggi yang dahulunya tidak bisa mengakses air bersih, sekarang sudah dibangun jaringan, sehingga akses air bersih tidak lagi di bak-bak umum, namun sudah masuk ke dalam rumah tangga. Begitupun dengan irigasi, lahan-lahan yang tinggi sudah dibangun jaringan, sehingga yang dahulunya lahan kering sekarang menjadi persawahan. Akibatnya, konflik air di 5 desa ini tidak terelakkan lagi yang disebabkan karena tidak seimbangannya antara ketersediaan air dengan kebutuhan. Kondisi ini semakin diperparah oleh buruknya tatakelola air di desa kawasan.

Tradisi *Besiru* yang dahulu sangat efektif mempererat kebersamaan masyarakat dalam pengelolaan SDA di 5 desa ini kini sudah hilang, begitupun dengan tradisi *Betabek* yang mengatur sikap dan perilaku masyarakat dalam berintraksi dengan alam, seperti *Bebangar* juga sekarang sudah tidak dipercayai lagi, justeru dianggap sebagai tahayyul belaka oleh generasi sekarang.

Tradisi menyimpan hasil panen di lumbung juga sudah hilang, bahkan generasi yang sekarang tidak mengenal “Lumbung.” Hal ini disebabkan karena rendahnya pendapatan petani. Betapa tidak, kepemilikan lahan

rata-rata di desa kawasan adalah 0,25 ha, dan pada umumnya petani tidak memiliki sumber pendapatan lain, hanya bergantung dari hasil pertanian. Di sisi lain, biaya produksi semakin meningkat yang dipengaruhi oleh upah buruh, pupuk dan obat-obatan yang semakin melambung tinggi, sementara harga jual hasil panen cenderung menurun.

Mahalnya biaya produksi dan rendahnya nilai jual hasil pertanian berdampak pada rendahnya pendapatan petani. Padahal, modal untuk membiayai kegiatan bertani, petani di desa kawasan pada umum meminjam di “Bank” dan di kerabat. Meminjam uang di Bank yang menyediakan kredit lunak seperti di BRI membutuhkan persyaratan yang rumit, sehingga petani terpaksa meminjam di Bank-bank swasta dan koperasi yang bunganya lebih besar. Akibatnya, petani di desa kawasan selalu dililit hutang. Kondisi inilah yang kemudian memaksa petani untuk harus menjual hasil panennya, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk melakukan “Saving” dari sebagian hasilnya. Dalam kondisi seperti ini, mereka yang paling terbebani adalah kaum perempuan. Menurut pengakuan para informan perempuan, ketika keuangan rumahtangga dalam keadaan paceklik, kebutuhan pokok tidak tercukupi, karena merasa ini sebagai beban dan tanggungjawab, mereka harus memutar kepala dengan cepat untuk memikirkan jalan keluarnya, karena jika tidak suami dan anak-anaknya bisa saja akan meluapkan kemarahannya kepada dirinya. Hal-hal yang mereka biasanya malu melakukannya, harus dibuang jauh demi suami dan anak-anaknya. Misalnya meminjam beras kepada tetangga atau orang tua. Sementara itu, informan laki-laki, pada kondisi tersebut tidak bisa melakukan apa-apa, menyerahkan urusannya kepada sang istri, karena memandang ini menjadi tugas istri.

2. Hasil Kajian Tahap II

Peranan lembaga

Idealnya, lembaga dan kelompok masyarakat yang melakukan program di 5 desa kawasan dapat melaksanakan programnya secara optimal dengan melakukan sinergi, maka percepatan pembangunan desa akan dapat diwujudkan. Namun, kenyataannya lembaga-lembaga mulai Pemdes, organisasi masyarakat setempat, LSM dan instansi pemerintahan belum bekerja secara optimal. Hal ini diakui oleh warga ketika difasilitasi FGD menggunakan alat kajian “Diagram Venn.”

Peserta FGD di 5 desa kawasan pada umumnya mengaku merasa belum mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah desa, mereka juga tidak mengetahui apa saja program pemerintah desa. Lembaga BPD diletakkan pada posisi yang cukup jauh dari masyarakat, pasalnya warga tidak mengenal BPD apalagi programnya, karena BPD dianggap tidak pernah melakukan sosialisasi. Begitu pula dengan lembaga LKMD, ketika ditanya tentang LKMD, peserta yang dari kalangan petani, buruh tani, pedagang sama sekali tidak mengenal LKMD. Padahal, keberadaan BPD dan LKMD dirasakan sangat penting bagi masyarakat.

Lembaga penyedia layanan kesehatan setempat, seperti PUSTU dan POLINDES dari segi akses sudah cukup memadai, begitu pula dengan pelayanan sudah cukup bagus, hanya saja ketersediaan obat-obatannya yang kurang, yang ada hanya obat generik. Kondisi ini terjadi di 3 desa, yaitu Desa Sapit, Beririjarak dan Suela. Sementara 2 desa lainnya, yaitu Desa Jurit Baru dan Bebidas dari segi akses, sebagian warga masih cukup kesulitan, apalagi pelayanan. Kondisi ini dikarenakan di Dua desa ini masih ada *Gubuk* yang sulit terjangkau karena infrastruktur jalan yang rusak.

PKK memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan kaum perempuan, idealnya lembaga ini bisa menjadi wadah bagi kaum perempuan untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya dalam rangka membangun desa,

lembaga ini seyogyanya bisa menjadi wadah bagi kaum perempuan untuk melakukan proses pembentukan sikap dan perilaku perempuan yang memiliki kapasitas dan kemandirian. Pada program PKK yang sudah dirumuskan secara nasional, sebenarnya sudah cukup baik. Namun dalam implementasinya di 5 desa kawasan nyaris tidak ada relevansinya dengan program PKK yang sudah baku. Kegiatan PKK di 5 desa ini umumnya hanya arisan dan pelatihan pembuatan tata boga, hal-hal yang bersifat mengembangkan kapasitas perempuan masih sangat kurang.

Warga yang melahirkan di POLINDES masih tetap berbiaya, padahal sudah ada program JAMPERSAL yang menggratiskan biaya persalinan bagi semua lapisan warga. Sebenarnya petugas kesehatan tidak meminta biaya kepada warga, namun karena merasa telah dibantu, tidak enak kemudian jika tidak memberikan uang sebagai ucapan terimakasih, petugas juga tidak menolak walaupun dia menyadari ini semua adalah tanggungjawabnya dan juga sudah dibayar pemerintah. Lambat laun hal ini menjadi kebiasaan, sehingga petugas tetap mengharapkannya. Akibatnya, jika warga tidak memberikan uang akan menjadi pertanyaan bagi petugas. Kisaran uang yang diberikan dari Rp.100.000-Rp.200.000.

POSYANDU sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama bagi ibu-ibu yang membutuhkan pelayanan informasi terkait kesehatan diri mereka dan anak-anak. Kader Posyandu tersebar di semua dusun hingga ke Gubuk-gubuk dan menyentuh sampai ke lapisan masyarakat yang paling bawah. Selain POSYANDU, ada jug *Belian* (Dukun Beranak) yang dirasakan sangat berperan dalam membantu upaya persalinan. *Belian* dianggap mampu memperkirakan kapan akan melahirkan, sehingga sebelum ke Polindes warga biasanya terlebih dahulu mendatangkan dukun untuk memeriksa kondisi kehamilan warga, jika saatnya untuk melahirkan sudah dalam hitungan jam, sang Dukun yang membawa warga ke Polindes. Di Desa Beririjarak, Dukun sangat berperan besar dalam membantu persalinan, sebelum melahirkan dijadikan tempat konsultasi kehamilan selain dokter oleh warga, pasca melahirkan Dukun berperan membersihkan bayi dan kotoran bekas

melahirkan. Sebagai imbalannya, sang Dukun akan diberikan *Andang-andang*, berupa uang, beras dan gula Pasir yang besarnya tergantung keihlasan warga.

Pekaseh memiliki peranan penting, terutama bagi para petani. Pada musim kemarau, kemampuan petani dalam mengatur pemanfaatan air mutlak dibutuhkan, karena jika tidak akan terjadi konflik di antara petani. *Pekaseh* di 5 desa ini dipandang cukup mampu mengakomodir kepentingan petani dalam pemanfaatan air dan memfasilitasi penyediaan jaringan irigasi yang baik.

Kelompok tani dipandang kurang berkontribusi bagi warga, keberadaannya masih dimanfaatkan oleh oknum warga yang membuat kelompok guna mendapatkan bantuan alat dan dana dari pemerintah. Setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah tidak dimanfaatkan untuk kepentingan petani.

PPL pertanian memiliki peran memberikan pendampingan kepada petani, namun pada kenyataannya petani menganggap PPL kurang sosialisasi, banyak petani yang tidak mengenalnya.

Instansi pemerintah, seperti UPT Kehutana, UPT pertanian masih belum memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di 5 desa ini. UPT kehutanan di dalam menjalankan perannya di masyarakat seringkali tanpa melibatkan peran aktif masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui apa yang dilakukan.

Di 5 desa wilayah kajian, teridentifikasi 2 buah pasar, yaitu Pasar Suela dan Pasar Jineng, di desa lainnya seperti di Desa Sapit, Bebidas dan Jurit Baru belum ada pasar, kecuali di Desa Jurit Baru, tetapi sipatnya pasar musiman yang hanya buka pada hari-hari tertentu. Keberadaan Pasar Suela Dan Beririjarak dirasakan sangat besar manfaatnya, terutama bagi kalangan perempuan. Kaum perempuan di 5 desa ini memiliki peran menjual hasil panen berupa sayur-sayuran, Pisang, Nangka, kelapa dll di pasar. Mereka juga yang ditugaskan membeli kebutuhan sehari-hari di pasar. Oleh karena itu, keberadaan pasar sangat berarti bagi kaum perempuan.

Bank-bank pemerintah, seperti BRI dipandang sangat jauh manfaatnya bagi masyarakat, karena proses dan persyaratan untuk mendapatkannya cukup sulit. Berbeda dengan Bank pemerintah, Bank-bank swasta dan koperasi justru lebih mudah diakses, walaupun bunganya tinggi.

Pada umumnya, posisi strategis di lembaga-lembaga yang sudah dijelaskan di atas masih menjadi domain kaum laki-laki, perempuan nyaris tidak ada. Di lembaga desa, seperti Pemdes, BPD dan LKMD sama sekali tidak ada perempuan yang terlibat di dalam kepengurusannya, kecuali di Pemdesnya, hanya di Desa Sapit ditemukan seorang perempuan yang menjadi staff. Begitu pula petugas lapangan seperti PPL dan kepala-kepala UPTD semuanya berjenis kelamin laki-laki.

B. Model Pengelolaan SDA Di Desa Kawasan

Desa kawasan memiliki ciri geografis dan tofografis yang relatif sama, sehingga potensi SDA yang dimiliki juga sama. Namun, Dua desa yaitu Sapit dan Suela memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan Desa Sapit adalah adanya kawasan hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat dengan skema *Hutan Kemasyarakatan* (HKm), sedangkan Desa Suela terdapat kawasan wisata alam yang dikelola oleh Pemerintah desa setempat. Tiga desa lainnya, yaitu Bebidas, Beririjarak dan Jurit baru dalam kajian ini lebih menitik pada isu pengelolaan air bersih. Ketiga desa ini merupakan sumber air, namun potensi konflik antar warga akibat kekurangan air cukup besar.

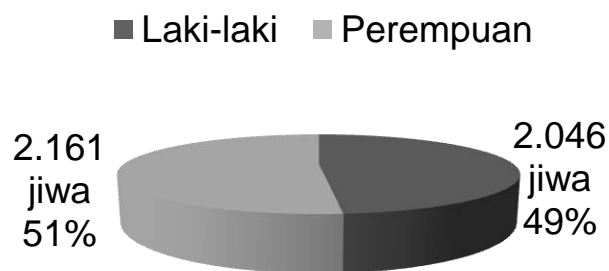
1. Desa Sapit

Secara administratif, Desa Sapit berada dalam wilayah Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Desa Sapit berbatasan dengan Desa Sembalun dari sebelah utara, Desa Suela sebelah selatan, Desa Kemabang Sari sebelah timur dan Desa Bebidas sebelah barat. Desa Sapit yang luasnya sekitar 1.440 ha dapat dijangkau dari ibu kota kabupaten Lombok Timur, Selong, dengan menggunakan kendaraan angkutan umum atau kendaraan pribadi dengan

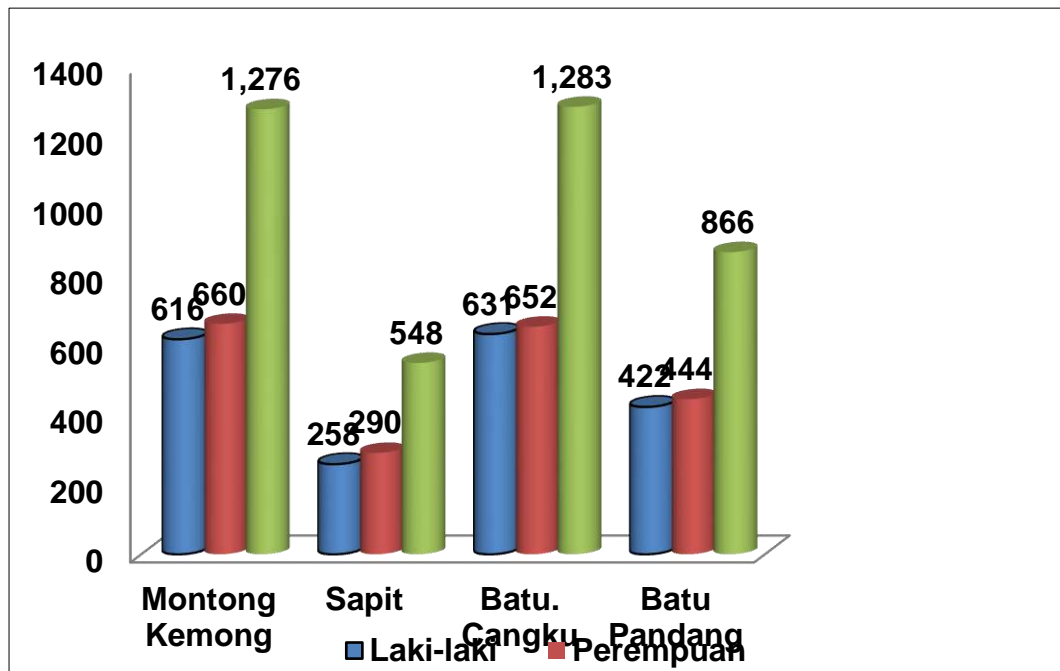
waktu tempuh sekitar 30 menit. Jarak tempuh Desa Sapit dari ibukota kecamatan 5 Km, ibu kota Kabupaten 35 Km dan jarak dari ibu kota propinsi 85 Km.

Berdasarkan data PRA (2010;1) menjelaskan bahwa secara administrative, Desa Sapit berbatasan dengan Desa Sembalun dari sebelah utara, Desa Suela sebelah selatan, Desa Kembang Sari sebelah timur dan Desa Bebidas sebelah barat. Sedangkan Luas wilayah 1440,7 ha dengan tofografi berbukit yang berada pada ketinggian mencapai 550 - 700 mdpl, beriklim tropis dengan curah hujan mencapai 2000-3000 mm/tahun dan suhu rata-rata 20-32 C. Secara orbitrasi, jarak terpanjanag dari ibukota kecamatan 5 Km, Ibu Kota Kabupaten 35 Km dan jarak dari ibu kota propinsi 85 Km.

Dari segi kependudukan, jumlah penduduk Desa Sapit pada tahun 2012 mencapai 3,973 (1,325 KK) terdiri dari laki-laki 1.927 jiwa (49 %) dan perempuan 2.046 jiwa (51 %). Dengan demikian jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki dengan selisih 119 jiwa sebagaimana tersaji pada diagram berikut.



Jumlah penduduk tertinggi berada di dusun Montong Kemong sebanyak 1,283 jiwa, disusul secara berturut-turut dusun Batu Canguk sebanyak 1,276 jiwa, dusun Sapit 866 jiwa dan dusun Batu Pandang 548 jiwa. Jumlah penduduk desa Sapit berdasarkan jenis kelamin dan dusun dapat dilihat pada Diagram di bawah.



Sumber : Samanta, Survey Sosial Ekonomi Rumah Tangga Desa Sapit, 2012

Sementara, berdasarkan kelompok usia, jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok usia 20 -24 tahun (489 jiwa). Jumlah penduduk kelompok usia 35-39 tahun terbesar kedua yaitu 408 jiwa, disusul masing-masing kelompok usia 10-14 tahun sebanyak 396 jiwa, kelompok usia 0-4 tahun sebanyak 287 jiwa, kelompok usia 30-34 tahun sebanyak 375 jiwa, kelompok usia 15-19 tahun sebanyak 336 jiwa, kelompok usia 5-9 tahun sebanyak 282 jiwa. Sementara jumlah penduduk terendah secara berturut-turut berada pada kelompok usia 55-59 tahun sebanyak 125, kelompok usia 60-64 tahun sebanyak 115 jiwa dan kelompok usia 65 tahun ke atas sebanyak 156 jiwa.

Desa Sapit sangat kaya dengan potensi sumber daya alam (SDA), di antara potensi tersebut adalah hutan seluas 454,50 ha, Mata Air sebanyak 4 buah dengan debit antara 15-70 liter/detik, lahan persawahan seluas 435,58 ha dan ladang 87,6 ha. Selain itu, terdapat sebuah situs sejarah, yaitu “Masjid Tua” yang dijadikan sebagai tempat ritual adat oleh masyarakat.

Perkembangan Pengelolaan Hutan Desa Sapit

Di Desa Sapit terdapat hutan lindung seluas 454,50 ha yang dikelola oleh masyarakat dengan skema *Hutan Kemasyarakatan (HKm)*. Awal mula pembukaan hutan Sapit dimulai sejak tahun 1970 oleh pengusaha (kontraktor) yang bekerja sama dengan Departemen Kehutanan dengan system kontrak selama 3 tahun. Kawasan yang dibuka adalah di Pidana seluas 50 ha yang melibatkan 200 KK sebagai penggarap dengan luas garapan 25 are/KK. Pohon kayu yang ada ditebang, dan kemudian ditanami kembali dengan pola tumpang sari. Jenis kayu yang ditanam oleh masyarakat penggarap saat itu adalah Suren, Mahoni, Kayu Manis dan Jamplung sebagai pohon tegakan serta Padi, Bawang Puth, Bawang Merah, Cabe dan Jangung sebagai tanaman tumpang sarinya.

Setelah kontrak berakhir, 3 (tiga) tahun kemudian masyarakat penggarap keluar dari kawasan hutan. Selanjutnya, pada tahun 1985 Departemen Kehutanan melalui pemerintah desa membuka kembali hutan, yaitu di kawasan Borok Nunggal dan Dupe seluas 125 ha dengan pola yang tidak jauh berbeda sebagaimana pada tahun 1970. Pohon tegakan yang ditanam yaitu Nangka dan Kayu Manis dengan jarak 3 x 3 meter.

Berikutnya, antara tahun 1986/1987 pemerintah kembali membuka lahan, juga melalui pemerintah desa yang berlokasi di kawasan Pesusa seluas 50 ha, dengan luas garapan rata-rata mencapai 25 are/KK. Pohon tegakanya adalah Sonokling. Pada periode ini, kontrak berakhir tahun 1988.

Menejelang tahun 1990 dibuka lagi kawasan yang berlokasi di Lembak seluas 50 ha dengan luas garapan rata-rata antara 25-45 are/KK. Kayu tegakan juga berupa Sonokling dan Mahoni, kontraknya tetap sama berjangka tiga tahun.

Selanjutnya pada tahun 1998, Departemen Kehutanan kembali membuka kawasan, kali ini programnya disebut dengan jalur hijau di kawasan Sakan dan Pidana. Program ini berupa penebangan kayu pada lahan mencapai luas

100 ha yang kemudian ditanami kembali pada jalur pinggir batas hutan sepanjang 50 m.

Pembukaan kawasan yang terahir dilakukan pada tahun 1999 di kawasan Sakan, Pidana dan Serata. Agak berbeda dengan sebelumnya, pembukaan kali ini diperuntukkan sebagai lahan HKm hingga sekarang.

Sejak mulai dibuka pada tahun 1970 hingga kini, jumlah kawasan hutan yang telah dibuka mencapai 454,50 ha yang masih dikelola oleh masyarakat dengan skema HKm.

Selanjutnya, untuk memudahkan dalam pengorganisasian masyarakat penggarap lahan, maka kawasan seluas 454,50 ha tersebut dipecah menjadi *Blok-blok* (bagian). Ada 6 (Enam) blok yang sudah dibentuk, yaitu blok Pidana, Serata, Dupe, Sakan, Pesuse dan Lembak. Setiap blok dipimpin oleh seorang ketua. Antara blok satu dengan yang lainnya dibatasi oleh sungai. Sehingga luas kawasan dan jumlah anggota setiap blok berbeda-beda. Sampai saat ini jumlah pengelola HKm dari 1,325 KK penduduk Desa Sapit tercatat lebih dari 700 KK sebagai pengelola HKm yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) HKm Dongo Baru Desa Sapit.

HKm diyakini sebagai salah satu langkah yang tepat untuk meminimalisir terjadinya perambahan dan penebangan hutan secara liar. Karena HKm disamping bertujuan untuk melestarikan hutan, juga untuk menambah sumber pendapatan masyarakat di sekitarnya.

“Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat.” (Pasal 3 Permenhut No.P.37 tahun 2007).

Masyarakat Desa Sapit sejak tahun 1999 sudah mulai menggarap hutan lindung seluas 454,50 ha, mereka memanfaatkannya untuk menanam berbagai

jenis tanaman untuk menambah pendapatan mereka. Akan tetapi sampai saat ini, hasil yang diperoleh dari HKm masih belum bisa meningkatkan taraf hidup penggarapnya.

Kondisi Kelompok

Kawasan HKm Sapit seluas 454,50 ha dikelola oleh *Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) HKm Dongo Baru* dengan jumlah penggarap lebih dari 700 KK yang notabenehnya adalah hampir semuanya kaum laki-laki. Berdasarkan dokumen kelompok, tidak lebih dari 50 orang perempuan yang tercatat sebagai KK pengelola.

GAPOKTAN HKm Dongo Baru berdiri pada bulan Desember tahun 2008 yang difasilitasi oleh GEMA ALAM. GAPOKTAN ini didirikan untuk menyikapi terbitnya Permnehut No.37 tahun 2007 yang mensyaratkan agar pengelolaan HKm harus mendapatkan legalitas. Untuk itu, masyarakat harus dipersiapkan dengan mendorong mereka untuk membentuk kelompok, karena hanya dengan ini masyarakat menjadi kuat dan dapat dipercaya oleh pemerintah untuk diberikan izin mengelola HKm.

Pembentukan GAPOKTAN ini diawali dengan proses identifikasi masalah untuk melihat seberapa penting dan urgen GAPOKTAN dibentuk. Berdasarkan hasil analisa masalah yang dilakukan oleh masyarakat, mengindikasikan adanya kemendesakan untuk dibentuk kelompok gabungan. Berdasarkan hal itulah, lalu kemudia dilakukan pembentukannya secara musyawarah yang melibatkan pengelola HKm.

GAPOKTAN HKm Dongo Baru merupakan kelompok gabungan yang di dalamnya terdiri dari 6 Blok (Kelompok). GAPOKTAN ini dipimpin oleh seorang ketua umum dan dibantu oleh wakil ketua, sekretaris, bendahara dan ketua Blok.

Setiap Blok memiliki struktur pengurus tersendiri yang terdiri dari ketua Blok, sekretaris, bendahara dan ketua Sub Blok. Ketua Sub Blok memimpin

setiap 20 orang penggarap, gunanya adalah untuk memudahkan pengorganisasian anggota di tingkat bawah.

Ketua umum GAPOKTAN dipilih secara musyawarah oleh pengurus blok. Meskipun begitu, dalam penentuan pengurus inti, terutama ketua umum, tidak didasarkan pada kemampuan dan pendidikannya, akan tetapi faktor ketokohan masih mendominasi.

Di Desa Sapit ada yang dinamakan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Dalam kehidupan bermasyarakat, tokoh adat lebih berperan dibandingkan dengan tokoh lainnya. Tokoh adat di desa ini memiliki peran strategis di dalam melaksanakan dan menjaga tradisi. Tokoh adat disebut "Mangku" sebagai tempat masyarakat untuk meminta petunjuk dalam mengelola sumber daya alam yang ada.

Meskipun saat ini tokoh adat sudah mulai kurang didengarkan oleh masyarakat, namun keberadaannya masih tetap penting dan tidak berani ditentang secara terbuka oleh masyarakat. Para tokoh adat umumnya adalah kalangan orang tua yang sudah tidak enerjik lagi untuk bekerja. Seringkali dalam memutuskan sesuatu ego ketokohnya yang mendominasi sehingga seringkali mengabaikan pendapat pengurus lainnya. Misalnya saja dalam pergantian sekretaris GAPOKTAN yang dilakukan secara sepihak oleh ketua umum tanpa membicarakannya terlebih dahulu dengan pengurus lainnya. orang yang ditunjuk justru tidak disukai dari segi integritasnya oleh pengurus lainnya. Meskipun begitu tidak pernah ada penentangan oleh pengurus, mereka terpaksa menerimanya walaupun nurani mereka menolak. Kondisi ini justru dimanfaatkan oleh sekretaris yang ditunjuk oleh ketua umum untuk kepentingan pribadinya. Seringkali GAPOKTAN dijual untuk mendapatkan proyek oleh sang sekretaris secara diam-diam. Akibatnya, organisasi menjadi kurang pergerakan dan kegiatannya seringkali tidak diketahui oleh pengurus apalagi anggota di tingkat bawah. Padahal GAPOKTAN ini sudah memiliki mekanisme kerja organisasi, yaitu berupa awig-awig. Pembagian tugas dan

wewenang mulai dari ketua umum sampai anggota sudah ada pembagian tugas yang jelas. Akan tetapi tidak dijalankan oleh ketua umum.

Pengelolaan HKm umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki, mulai pembibitan sampai pada panen. Hal ini mengingat kondisi topografis kawasan dan letaknya yang relatif jauh dari permukiman. Masyarakat memandang cukup berbahaya dan beresiko jika perempuan masuk dalam kawasan tersebut. Hal ini bukan berarti perempuan tidak diperbolehkan masuk atau melakukan aktifitas. Akan tetapi semata-mata dipandang sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan. Perempuan juga memandang hal tersebut sebagai tugas dan tanggungjawab laki-laki.

Ketika hasil panen sudah berada di rumah, perempuan kemudian mengambil berperan menjualnya ke pasar dengan harga yang ditentukan sendiri, tanpa harus berkomunikasi kepada laki-laki (suami). Hal ini dipandang lumrah dan adil, karena jika perempuan dipaksakan yang mengelola HKm justru sebaliknya akan semakin menyakiti perempuan.

Hanya saja, banyak perempuan janda miskin yang tidak mendapatkan bagian sebagai pengelola, padahal HKm ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Akan tetapi sebaliknya banyak orang-orang kaya yang menjadi penggarap, dan luas lahan yang mereka garap lebih banyak. Hal ini disebabkan karena mereka yang kaya memiliki modal yang cukup untuk mengelola. Sedangkan para janda miskin dipandang tidak mampu mengelolanya, sehingga ditakutkan akan mentelantarkannya.

2. Desa Suela

Desa suela memiliki luas wilayah 99,4 km² yang dimanfaatkan untuk permukiman 182 ha, 625 ha persawahan dengan rincian; 214 ha sawah irigasi teknis, 371 ha sawah irigasi setengah teknis dan sawah tadah hujan seluas 40 ha. Selanjutnya hutan lindung seluas 89,2 ha, perkebunan 84 ha, pekarangan 4,8 ha, perkantoran 6,5 ha dan pasar 1 ha.

Desa Suela berada pada ketinggian 520 mpdl dengan tofografi sebagian besar berbukit. Desa ini merupakan pusat kegiatan dan ibu kota kecamatan yang bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Jarak tempuh dari desa ini menuju ibu kota kabupaten adalah 28 km, sedangkan jarak menuju ibu kota propinsi mencapai 76 km.

Secara demografi, desa ini memiliki penduduk yang cukup padat dengan jumlah penduduk 7377 jiwa atau 2176 KK yang terdiri dari 3718 jiwa perempuan dan 3659 jiwa laki-laki.

Mata pencaharian masyarakat suela didominasi oleh sektor pertanian yang mencapai angka 685 laki-laki dan 685 perempuan, angka terbanyak adalah sebagai buruh tani berjumlah 811 laki-laki dan 582 perempuan, bekerja sebagai buruh migran 264 orang, berprofesi sebagai PNS sebanyak 51 laki dan 3 perempuan, bekerja di sektor industri rumah tangga 5 laki dan 28 perempuan, pedagang keliling 2 perempuan 50 laki-laki, peternak 205 orang laki-laki dan 515 orang perempuan, montir 9 orang, dokter 1 orang perempuan, dan bidan sebanyak 3 orang.

Dilihat dari segi potensi, Desa Suela memiliki banyak potensi yang menjadikannya sebagai desa yang terkenal. Potensi tersebut adalah hutan yang di dalamnya terdapat mata air yang dimanfaatkan sebagai tempat pemandian yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat Lombok bahkan nusantara. Terdapat pula hamparan sawah yang subur sehingga menghasilkan pertanian dengan kualitas yang tinggi. Salah satu tanaman primadona petani di desa ini adalah Tembakau Virginia atau masyarakat setempat menyebutnya dengan nama “Tembakau Oven.”

Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat

a. Perkembangan Pengelolaan Wisata Lemor

Di Desa Suela terdapat hutan lindung seluas 89,2 ha yang memiliki fungsi sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Hutan tersebut diberi nama

“Lemor”. Di dalamnya terdapat mata air yang menjadi sumber air irigasi dan minum bagi masyarakat Desa Suela dan sekitarnya.

Pada sebelum tahun 2000, kondisi hutan Lemor masih relatif alami, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kayu-kayu besar dengan tingkat kerapatan yang padat. Untuk menjaga keamanan hutan maka pemerintah desa mengangkat seorang petugas yang disebut “Lang-lang gawah.” Persyaratan untuk bisa menjadi Lang-lang gawah harus siap keluar masuk mengontrol sekitar hutan. Pada masa ini, hutan Lemor belum dijadikan sebagai tempat wisata, akan tetapi dijadikan sebagai tempat melakukan ritual adat. Karena waktu itu, Lemor sangat disakralkan oleh warga.

Prosesi pelaksanaan ritual adat dipimpin oleh seorang “Mangku” yang dipercayai bisa berkomunikasi dengan penjaga hutan (Jin). Karena kemampuannya berkomunikasi dengan *Jin* penjaga hutan tersebut, hal-hal yang mungkin akan mengganggu kehadiran manusia di sana dapat dikendalikan oleh sang Mangku. Selain itu, Mangku dipandang dapat memfasilitasi permohonan masyarakat kepada penjaga hutan. Adapun bentuk tradisi adat yang dilakukan adalah :

- *Ngayu-ayu*

Ngayu-ayu adalah sebuah tradisi minta air yang dilakukan jika desa dilanda kekeringan. Upacara ini dilakukan setiap tahun tepatnya pada setiap hari Rabu. Dilakukan pada hari tersebut karena menurut masyarakat Suela, hari itu adalah hari yang bagus untuk berdoa yang diyakini doa akan cepat terkabul. Upacara Ngayu-ayu biasanya diikuti oleh semua desa yang sumber airnya dari hutan Lemor dan oleh pemerintah desa, pengurus air, tokoh agama, tokoh masyarakat dan Camat. Kegiatan upacara adat selalu diiringi oleh irama musik dan lagu daerah yang dimainkan oleh kelompok musik daerah setempat yang disebut “Gamelan.”

Berikut adalah prosesi upacara Ngayu-ayu:

- 1) Menyembelih sapi di saluran air
- 2) Memasak daging sapi yang sudah disembelih
- 3) Tutung (membakar) dupa dan meletakkan sesajen berupa nasi dan daging sapi yang sudah dimasak.
- 4) Zikiran dan berdoa meminta hujan
- 5) Makan-makan
- 6) Mandi di kolam

- ***Bisok Medo***

Bisok Medo adalah sebuah tradisi memandikan orang yang sudah sembuh dari penyakit setelah diberikan minum air di Lemor. Mata air Lemor dijadikan sebagai obat untuk orang sakit yang disebabkan karena diganggu oleh penunggu hutan Lemor (roh-roh atau jin-jin). Setelah orang tersebut sembuh maka dilakukan syukuran di lemor dengan proses sebagai berikut :

- 1) Mangku membakar dupa di sumber mata air sambil menyampaikan niat/ tujuan upacara, dan meletakkan pesajik (nasi, lauk pauk dan jajan), kemudian menaruh sesajen disekitar mata air dan menggantung topat di atas mata air.
- 2) Memandikan orang yang sembuh dari penyakitnya dengan menggunakan mata air lemor.
- 3) Zikiran dan berdoa

- **Upacara khitanan**

- **Bertapa**

Bertapa dilakukan di dekat sumber mata air yang tujuannya antara lain:

- 1) Untuk mencari hidayah
- 2) Mencari senggeger (guna-guna)
- 3) Mencari permata
- 4) Mencari jodoh

5) Mencari kekuatan kekebalan

Setelah tahun 2000, kawasan Hutan Lemor diambilalih dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Lombok Timur sebagai kawasan pariwisata. Lalu kemudian dilakukan pembangunan dan pengadaan sarana penunjang, seperti kolam pemandian, berugak, kamar ganti pakaian, tangga dan gerbang. Sistem pengelolaan wisata lemor dilakukan dengan sistem kontrak dimana siapapun boleh mengontrak lemor untuk dikelola.

Lemor pertama kali dikontrak oleh kepala Desa Suela scara pribadi yang menjabat pada saat itu yaitu H. Sahrim dengan biaya sekitar Rp.300.000. Semenjak itu diberlakukanlah sistem karcis bagi setiap pengunjung, tetapi hanya berlaku untuk masyarakat di luar Desa Suela. Selanjutnya pada tahun 2013, wisata Lemor dikontrak oleh Pemdes dengan investasi senilai Rp.40 juta.

Sejak tahun 2007, Hutan Lemor diperjuangkan sebagai Kebun Raya dan sekarang kawasan hutan tersebut sudah mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan. Kebun Raya Lombok dirancang sebagai Kebun Raya Berbasis Masyarakat. Dengan adanya kebun raya ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, selain itu juga diharapkan sebagai tempat pendidikan, penelitian, budidaya keanekaragaman hayati dan rekreasi.

3. Meningkatkan Akses Layanan Air Bersih Di Desa Beririjarak, Bebidas dan Jurit Baru

3.1 Desa Beririjarak

Kondisi Geografis

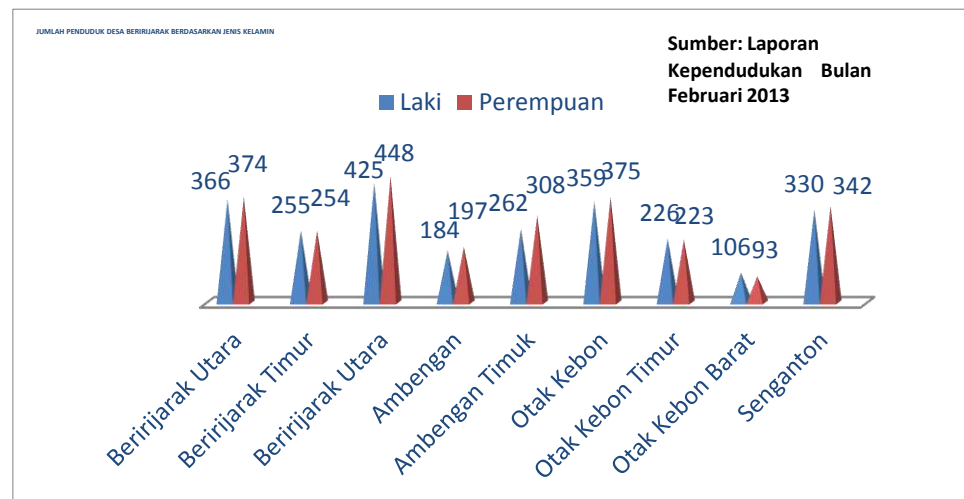
Secara geografis, Desa Beririjarak merupakan desa kawasan lingkaran yang berbatasan langsung dengan hutan lindung dengan luas wilayah 1.047 ha. Secara tofografi, bentuk muka bumi Desa Beririjarak

sebagian berbukit dengan tingkat kemiringan 15-70⁰, berada pada ketinggian 400-600 mdpl.

Keadaan Iklim Desa Beririjarak termasuk klasifikasi iklim type D, yaitu iklim tropis dengan temperatur rata-rata 30 – 33 derajat Celsius, banyaknya curah hujan antara 1.500 mm – 2.500 mm per-tahun dengan jumlah hujan sebanyak 120 hari per-tahun. Jenis tanah aluvial kelabu dengan tingkatan kesuburan yang cukup tinggi. Kondisi ini sangat cocok untuk berbagai jenis tanaman pangan dan tanaman musiman serta tanaman perkebunan. Seperti Padi, Jagung, Bawang Putih, Bawang Merah, sayuran, Tembakau, Pisang, Cokelat tanaman buah – buahan dll.

Demografi

Masyarakat yang mendiami Desa Beririjarak sangat homogen, tidak ada keragaman pada suku atau agama, semuanya merupakan keturunan suku sasak yang beragama Islam. Berdasarkan data laporan kependudukan tahun 2013, penduduk Desa Beririjarak berjumlah 5.127 jiwa yang terdiri dari 2.513 jiwa laki-laki dan 2.614 jiwa perempuan.



Potensi Sumber Daya Alam

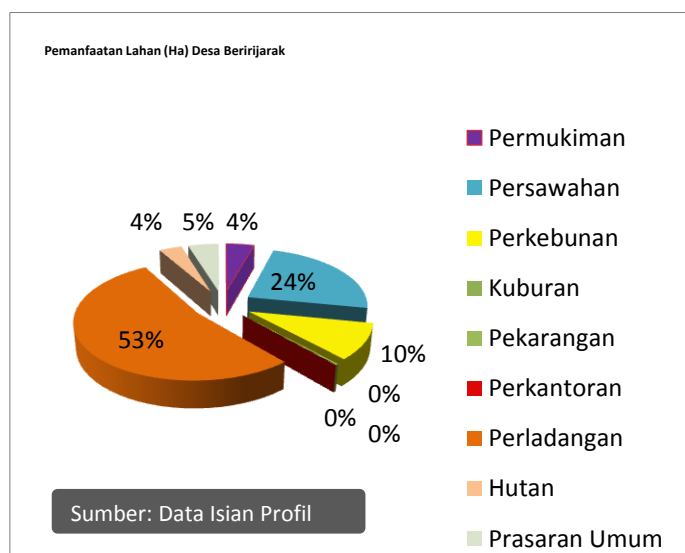
Terdapat berbagai Potensi sumber daya alam strategis yang dimiliki oleh Desa Beririjarak, di antaranya adalah hutan Gawah Gong seluas 40 ha.

Hutan tersebut merupakan jantung kehidupan masyarakat, karena di dalamnya terdapat 3 buah mata air yang menjadi sumber air, baik untuk air bersih ataupun irigasi. Mata air dimaksud adalah mata air Ober – Ober, mata air Ketiping dan mata air Aik Numpas. Selain mata air, di dalam kawasan hutan Gawah Gong terdapat satu titik yang memiliki potensi wisata yang selama ini sering dikunjungi sebagai tujuan rekreasi masyarakat setempat. Potensi tersebut berupa sungai sebagai tempat pemandian. Sungai tersebut berbentuk terowongan yang pada kiri-kanannya berupa tebing dan bebatuan. Di sekitarnya, terdapat pula kawasan khusus yang bisa dikembangkan sebagai tempat “Camping ground.” Kondisi ini diperindah lagi dengan tofografi bumi yang berbukit – bukit membentuk desain hamparan sawah yang tampak bergelombang, dipadukan dengan pemandangan alam yang hijau, menciptakan panorama alam yang indah dan tampak alami dan menarik pandangan mata.

Selain itu, Desa ini dihimpit oleh hamparan persawahan dan ladang yang cukup luas. Kondisi tanahnya cukup subur, dengan jenis tanah aluvial-kelabu. Jenis tanah ini sangat cocok untuk berbagai jenis tanaman pangan, tanaman musiman serta tanaman perkebunan. Seperti Padi, Jagung, Bawang Putih, Bawang Merah, sayuran, Tembakau, Pisang, Cokelat tanaman buah – buahan dll.

Peruntukan Lahan

Desa Beririjarak memiliki luas wilayah 1047 m. Berdasarkan data isian



profil desa tahun 2012 peruntukan lahan di desa ini terdiri dari permukiman 49 ha, hutan lindung 40 ha, persawahan 265 ha, perkebunan 113 ha,

ladang 593,98 ha, pekarangan 0,50 ha, pekuburan 3,40 ha, perkantoran 0,12 ha dan prasarana umum lainnya 53 ha.

3.2 Desa Bebidas

Kondisi Geografis

Desa Bebidas memiliki luas wilayah 2.908 Ha, dengan batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan TNGR, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Otak Rarangan, Sebelah Barat berbatasan dengan Karang Baru Timur dan Desa Jeneng dan Beririjarak dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sapit dan DesaSuela. Secara topografi, Desa Bebidas memiliki wilayah yang memanjang dengan kontur relatif berbukit.

Tabel 1.3 Nama Dusun dan Luas wilayah

NO	NAMA DUSUN	LUAS WILAYAH (ha)
1	BEBIDAS SELATAN	103
2	BEBIDAS UTARA	76
3	TIBU LAMPIT TIMUR	375
4	JURANG KOAK	392
5	TANAK BETIAN	132
6	BURNE	277
7	BEBIDAS TIMUR	81
8	BEBIDAS BARAT	72
9	DASAN REBAN	450
10	TANDAN GOLOK	225
11	LIWATAN PUCAT	175
12	LENDANG NANGKA	105

Sumber: Profil Desa Bebidas tahun 201

Demografi

Berdasarkan profil desa tahun 2012, jumlah penduduk desa Bebidas adalah 12.348 jiwa atau 3.693 KK.

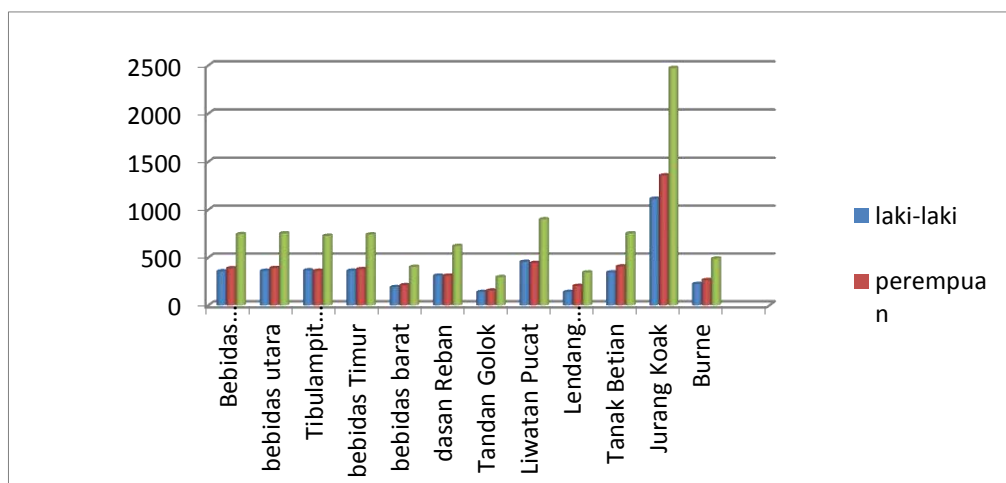
Tabel 1.4. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga

NO	NAMA DUSUN	JML PENDUDUK	JUMLAH KK
1	BEBIDAS SELATAN	1031	355
2	BEBIDAS UTARA	826	287
3	TIBU LAMPIT TIMUR	1150	315
4	JURANG KOAK	1302	408
5	TANAK BETIAN	763	286
6	BURNE	543	192
7	BEBIDAS TIMUR	452	171
8	BEBIDAS BARAT	844	247
9	DASAN REBAN	900	225
10	TANDAN GOLOK	375	125
11	LIWATAN PUCAT	875	306
12	LENDANG NANGKA	482	176
JUMLAH		12.348	3.693

Sumber: Profil Desa Bebidas tahun 2012

Penduduk Desa Bebidas tersebar di 12 dusun dan dusun yang paling banyak penduduknya adalah Dusun Jurang Koak sebanyak 1302 jiwa dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah dusun Tandan Golok sebanyak 375 jiwa.

Grafik 2.1 Jumlah penduduk Desa Bebidas berdasarkan jenis kelamin



Sumber : Laporan Penduduk setiap bulan

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini terjadi pada semua dusun.

3.3 Desa Jurit Baru

Kondisi Geografis

Desa Jurit Baru merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pringgasela yang terdiri dari 9 dusun yaitu Banok, Selak Aik, Dasan Paok, Sukaria, Kebon Benyer, Bolen, Sambik Elen, Sukatani dan Mekar Sari. Jarak ibukota Kecamatan dari desa Jurit Baru 8 km, jika ditempuh menggunakan sepeda motor membutuhkan waktu 30 menit. Sedangkan jarak tempuh menuju ke ibu kota kabupaten dari Desa Jurit baru adalah 22 Km dengan lama tempuh menggunakan kendaraan bermotor 40 menit. Dari desa Jurit Baru menuju ke ibu kota propinsi berjarak 68 km dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor selama 2 jam.

Desa Jurit Baru memiliki curah hujan rata-rata 2000-3000 Mm dengan jumlah bulan hujan yakni 6 bulan. Tingkat kelembapan mencapai 75-85% dengan suhu rata-rata harian 20,9-32,9oc. Tinggi tempat dari permukaan laut 520 mdpl dengan tingkat kemiringan tanah 2-15 derajat.

Adapun batas Desa Jurit Baru adalah :

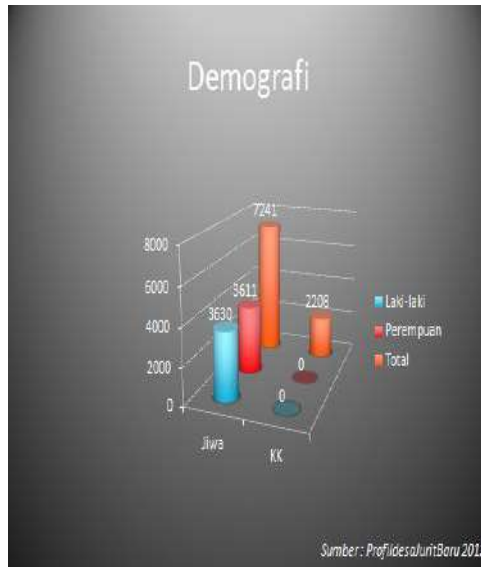
Sebelah Utara : Taman Nasional Gunung Rinjani kecamatan Pringgasela

Sebelah selatan : Desa Jurit dan desa Lendang Nangka Utara kecamatan Pringgasela dan Masbagggik

Sebelah timur : Desa Pengadangan Barat kecamatan Pringgasela

Sebelah Barat : Desa Lendang Nangka Utara dan Desa Jeruk Manis kecamatan Masbagik dan Sikur

Demografi



Pada tahun 2012 jumlah penduduk Desa Jurit Baru berdasarkan berdasarkan profil desa sebanyak 7241 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 3630 Jiwa dan Perempuan berjumlah 3611 jiwa, adapun jumlah KK sebanyak 2208.

Peruntukan Lahan

Desa Jurit Baru memiliki total luas 613.44 ha/m². Pemukiman 15 ha/m², Persawahan 206.18 ha/m², Ladang dan Perkebunan 376.46 ha/m², Kuburan 3.5 ha/m², Pekarangan 9.03 ha/m², Perkantoran 0.18ha/m², Prasarana umum lainnya 3,09 ha/m. Dengan perincian sebagai berikut: Sawah irigasi ½ teknis 206.18 ha/m², Tegal/ladang 188 ha/m², Tanah perkebunan perorangan 188.46 ha/m², Kebun/ladang desa 0,38 ha/m², Lapangan olahraga 0.48 ha/m², Perkantoran pemerintah 3,5 ha/m², Bangunan sekolah 3 ha/m², Jalan 2,50 ha/m² dan Hutan lindung 700.03 ha/m².

Model Pengelolaan Air Bersih

Desa Beririjarak, Bebidas dan Jurit Baru merupakan sumber air. di sekitaran wilayah desa ini terdapat banyak mata air yang masih aktif dimanfaatkan sebagai sumber air minum dan irigasi oleh masyarakat desa tersebut dan desa-desa yang ada disekitarnya. Hanya saja masih terjadi konflik dalam pemanfaatannya, terutama air bersih. Hal ini disebabkan karena sistim tata kelola air bersih di Ketiga desa ini masih kurang baik,

sehingga tidak bisa menjamin pemerataannya ke semua lapisan masyarakat.

Sistim pendistribusian air bersih di Ketiga desa ini sama, yaitu menggunakan system reservouire. Di setiap dusun dibuatkan bak-bak pembagian. Warga mengambil langsung dari bak pembagian menggunakan pipa dan slang. Setiap rumah tangga sudah disipapkan di bak pembagian tempat menyambung pipa atau slang yang dialirkan ke rumahnya. Tempat menyambung pipa atau slang berupa slang kecil yang ukurannya sama bagi semua lapisan masyarakat. Tidak ada perguliran air dari rumah tangga yang satu kepada yang lainnya, setiap rumah tangga airnya mengalir tanpa henti, hal ini terjadi karena rumah tangga tidak menggunakan kran.

Akibat dari sistim ini, pembagian air tidak bisa merata, meskipun semua rumah tangga sudah dijatah dengan volume yang sama. Sebagian warga akses airnya terpenuhi, sebagian lagi sering macet, bahkan ada juga yang tidak mendapatkan air. Kondisi ini yang seringkali memicu konflik antar warga. Mereka yang paling merasakan dampak terburuk adalah kaum perempuan. Karena pekerjaan perempuan di Ketiga desa ini identik dengan dapur dan mencuci yang notabenenya tidak bisa jauh dari air. Pemandangan yang terjadi jika air macet biasanya para wanita pergi ke sungai dan bak-bak umum membawa cucian sambil menggendong anak-anak mereka, selain itu mereka juga mengambil air untuk keperluan minum dan masak di rumah. Hal ini semakin menambah beban pekerjaan kaum perempuan.

Adapun iuran yang dibebankan kepada setiap rumah tangga pengguna air bervariasi, tergantung dari kebijakan masing-masing pemerintah desanya, kisaranya antara Rp.1000 – Rp.2000. Sedangkan rumah tangga yang tidak terjangkau dibebani jika ada kerusakan pipa. Iuran yang terkumpul digunakan untuk menggaji petugas.

Selama ini, masyarakat memandang penyebab terjadinya kekurangan air adalah kondisi pipa yang tidak bagus, sehingga upaya-upaya yang dilakukan adalah mengganti pipa yang rusak dan menggantinya dengan pipa yang lebih besar. Meskipun begitu, tetap saja pembagian air tidak bisa merata.

Untuk mengontrol jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan pada pipa atau ada yang menyumbat pipa, maka ditunjuklah seorang petugas. Pada umumnya, di Ketiga desa ini penetapan petugas tidak melalui musyawarah, akan tetapi ditetapkan langsung oleh kepala desa atau kadus, ada pula yang menjadi petugas adalah Kadus. Hal ini karena masyarakat memandang pengurusan air sudah melekat dalam tugas pokok seorang Kadus dan sang Kadus juga merasa menjadi tanggungjawabnya, sehingga jika terjadi kerusakan atau airnya macet Kadus atas inisiatifnya melakukan pemeriksaan dan perbaikan.

Setelah dilakukan analisa terhadap permasalahan air bersih di Ketiga desa ini, masyarakat menyadari ternyata permasalahannya bukan semata-mata soal infrastuktur, namun permasalahan yang mendasar adalah sistim tata kelolanya yang tidak tepat. Sebagai apapun pipa yang digunakan untuk mengambil air dari sumbernya, jika tidak ditata dengan baik pembagian pada tingkat rumah tangga, maka dengan kondisi air yang ada, sulit untuk bisa menjamin pemerataan air bersih. Maka infrastruktur dan sistem pembagiannya mesti harus dibenahi secara bersamaan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka konflik pemanfaatan air akan terus, bahkan akan semakin parah pada masa anak cucu kedepan. Mengingat, jumlah penduduk terus bertambah, sementara debit mata air cenderung terus mengecil.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah bersama masyarakat di Desa Beririjarak, Bebidas dan Jurit Baru mestinya memikirkan untuk membuat regulasi atau peraturan desa yang mengatur pemanfaatan air. Selain itu, mestinya harus ada lembaga desa yang

diberikan wewenang khusus untuk mengelola pemanfaatan air agar pemanfaatannya lebih terencana dan teratur. Tidak hanya itu, jika dikelola dengan baik, akan bisa menambah pendapatan desa. Dana hasil iuran warga jika dikelola dengan baik, bisa digunakan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat dan juga untuk memelihara keberlangsungan sumber air.

Pengelolaan air yang baik dan adil mensyaratkan juga adanya pelibatan kaum perempuan, bentuknya bisa diperankan pada struktur kepengurusan pengelola air. Hal ini penting, mengingat laki-laki dan perempuan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, jika terjadi sinergi diantara kedua jenis kelamin ini maka tentu saja akan terjadi keseimbangan.

Selama ini, peluang kaum perempuan untuk bisa berperan dalam pengelolaan air bersih di Ketiga desa ini tidak ada samasekali. Karena ketika berbicara soal pengelolaan, pandangan yang sudah melekat di masyarakat bahwa yang namanya pengelolaan itu adalah bersifat fisik, seperti perbaikan pipa, mengontrol jaringan dan mendatangi sumber air ketika macet. Persepsi semacam ini menjadikan perempuan tidak terfikirkan oleh masyarakat ketika berbicara pengelolaan. Karena dipandang ini sebagai pekerjaan berat yang membutuhkan kekuatan fisik dan hanya lelaki yang bisa. Sebaliknya, perempuan juga menolak untuk diperankan, karena merasa tidak pantas untuk mereka lakukan, mereka memandang ini adalah pekerjaan laki-laki.

Idealnya, pengelolaan air yang terlembaga dan terorganisir, bukan hanya soal pembangunan fisik air, namun juga bagaimana air itu bisa terjaga keberlanjutannya, bagaimana agar air itu bisa dikelola untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan bagaimana agar pemanfaatannya hemat dan tidak ada yang disia-siakan. Hal-hal ini tentu saja perempuan sangat mampu untuk memikirkannya.

Masyarakat dan pemerintah Ketiga desa ini sudah mulai menyadari hal tersebut, hal ini dibuktikan dengan telah terbentuknya Himpunan Pengguna Air Minum (HIPAM) di Desa Jurit Baru dan Desa Bebidas, sementara itu di Desa Berirjarak memulainya dengan membuat peraturan desa tentang pengelolaan air bersih.

Dalam pembentukan HIPAM, keterlibatan perempuan mulai diperhatikan oleh pemerintah desa, hal ini dibuktikan dengan dimasukkannya perwakilan perempuan sebagai pengurus, meskipun dipandang lebih identik dengan peran bendahara dan sekeretaris. Setidaknya kesadaran dari kaum laki-laki sudah mulai muncul. Akan tetapi sangat disayangkan, ketika diberikan peluang, justeru perempuan cenderung menolak dan menyerahkannya menjadi urusan laki-laki saja, mereka menganggap diri tidak mampu.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal yang terkait dengan hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perempuan di 5 Desa kawasan Sub DAS Pohgading Sunggen dan Pancor barong belum memiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga kurang mendapatkan kepercayaan dari laki-laki dalam pengelolaan SDA, dan perempuan sendiri tidak memiliki kepercayaan diri, sehingga cenderung menolak ketika difungsikan di dalam kepengurusan kelompok tani, Himpunan Pengelola Air Bersih dan di kelembagaan desa lainnya.
2. Persepsi bahwa laki-laki harus lebih dominan, superior dan berkuasa dalam kehidupan keluarga dibanding perempuan ternyata tidak sejalan dengan alokasi kekuasaan yang senyatanya di dalam keluarga. Sebagian besar keluarga yang diamati menerapkan pola bersama-seimbang dalam pengambilan keputusan.
3. Perbedaan peran dan upah dalam pengelolaan sumber daya alam di 5 desa kawasan yang selama ini dipandang sebagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan oleh sebagian kalangan, dari hasil wawancara dengan warga baik laki-laki ataupun perempuan justru memandangnya sudah adil. Misalnya saja, pada kegiatan olah lahan yang dipandang sebagai pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang kuat, dipercayakan kepada laki-laki, dan upahnya pun lebih mahal dibandingkan dengan kegiatan penyiangan yang dipandang lebih ringan pekerjaannya, sehingga upahnya juga lebih murah.
4. Perempuan memandang beban kerjanya dalam rumah tangga yang ditambah lagi dengan pekerjaan bertani atau berburuh jauh lebih berat jika dibandingkan dengan laki-laki, sehingga mereka pada dasarnya merasakannya sebagai

beban yang cukup membuatnya menderita. Meskipun begitu, mereka melakukan pekerjaannya dengan hati yang tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Sementara itu, laki-laki dengan sangat egois memandang hal itu sudah menjadi tugas dan kewajibannya, sehingga perempuan tidak boleh mengeluh, apalagi tidak menjalankannya.

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi laki-laki di 5 desa kawasan Kabupaten Lombok Timur seharusnya memberikan kepercayaan kepada perempuan untuk dapat berperan aktif dalam pengelolaan SDA, begitu pula dengan perempuan harus meningkatkan kapasitas dirinya sehingga memiliki kepercayaan diri jika diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan SDA.
2. Bagi perempuan di 5 Desa kawasan Kabupaten Lombok Timur, seharusnya mengetahui peran dan kekuasaannya dalam keluarga yang tidak hanya berada di bawah suami, sehingga terjadi suatu hubungan dan komunikasi yang lancar serta mengacu pada nilai-nilai yang diajarkan oleh agama dan budaya.
3. Menghilangkan egoisme laki-laki agar membuka hati dan menepikan pandangannya yang menganggap pekerjaan domestik merupakan tugas dan tanggungjawab perempuan semata, sehingga terjadi saling mengasihani dan membantu di dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (1998). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darsono. Valentinus. 1995, Pengantar Ilmu Lingkungan. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya
- Habibuddin , (2007). *Hak perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga*. LPM IAIH Pancor Lombok Timur
- Habibuddin, (2007). *Dasar-dasar Participatory Action Research (PAR)*. LPM IAIH Pancor Lombok Timur
- Mubyarto, 1987, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan, cetakan pertama, LP3ES, Jakarta.
- Soemarwoto.Otto. 1997, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan.
- Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang *perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Jakarta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Vitalaya S. Hubeis, Aida. 2010, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press
- [WHO] *World Health Organization* 2012, *What Do We Mean By “Sex” and “Gender”*. [Artikel]. (<http://www.who.int/gender/whatisgender/en/index.html>) [diakses 8 Agustus 2012]
- William F. Ogburn. 1964, *Culture and Social Change*. Etc. Phoenix Books, no. P171